



www.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

# WiRA

Volume 59 / No. 43 / Maret-April 2016

## PENGEMBANGAN POSTUR PERTAHANAN MILITER GUNA MENDUKUNG TERWUJUDNYA POROS MARITIM DUNIA

BANTUAN KESEHATAN INDONESIA UNTUK  
TIMOR LESTE

NASIONALISME MASYARAKAT SEBAGAI  
BENTUK BELA NEGARA  
DALAM MEWUJUDKAN KEKUATAN  
PERTAHANAN

PERLUNYA PEMBINAAN KADER BELA  
NEGARA DALAM BINGKAI PERTAHANAN  
NEGARA INDONESIA

PERAN TNI DALAM GLOBAL HEALTH  
SECURITY AGENDA (GSHA)

PROFIL SATKER BADAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN  
PERTAHANAN

ISSN 1693-0231



9 771693 023126

INDONESIA



PT-01  
SEN

## *Sevambi Redaksi*

Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca dengan edisi terbaru WIRA Maret-April 2016. Dalam edisi ini, tim redaksi membuat sedikit perubahan baik tampilan maupun isi. Tujuannya adalah agar WIRA tampil lebih segar dan lebih bermutu serta mengakomodir keinginan pembaca agar bisa lebih banyak menampilkan artikel dan berita. Dalam edisi ini, tim redaksi mengangkat tema yang berkaitan dengan usaha Indonesia sebagai poros maritim dunia. Penguatan bela negara tetap menjadi fokus Kemhan, maka dalam edisi ini beberapa artikel Bela negara tetap kami tampilkan seperti nasionalisme sebagai bentuk bela negara dalam mewujudkan perkuatan pertahanan dan perlunya Pembinaan Kader Bela Negara. Beberapa kegiatan bersama TNI juga kami tampilkan sebagai tambahan informasi yaitu bantuan kesehatan untuk Timor Leste dan peran TNI dalam *Global Health Security Agenda* (GHSA). Sebagai penutup, profil Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan akan mengisi kolom profil satker Wira edisi ini.

Para Pembaca WIRA yang kami banggakan,

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran. Bagi yang ingin mendapatkan majalah WIRA bisa menghubungi tim redaksi kami melalui email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id). Semoga majalah WIRA edisi Maret-April 2016 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

# Daftar Isi

## DEWAN REDAKSI

### Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan  
Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan  
Laksda TNI Widodo, M.Sc

### Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan  
Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro, M.Si  
(Han)

### Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik  
Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol,  
M.A.

### Redaksi:

Letkol Arm Joko Riyanto, M.Si.

Pns Mutiara Silaen, S.Kom, M.AP.

### Desain Grafis:

Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom.

Pns Imam Rosyadi

### Foto:

Fotografer Puskom Publik Kemhan

### Percetakan & Sirkulasi:

Pns Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Diterbitkan oleh:  
Puskom Publik Kemhan,  
Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

## PENGEMBANGAN POSTUR PERTAHANAN MILITER GUNA MENDUKUNG TERWUJUDNYA POROS MARITIM DUNIA



Kedudukan Poros Maritim Dunia sebagai konsep geopolitik menuntut pemerintah untuk membangun dan mengembangkan elemen-elemen kekuatan nasional yang meliputi diplomasi, ekonomi, politik dan kekuatan pertahanan negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung. Hal ini relevan dengan konsep "Trisakti".

## BANTUAN KESEHATAN INDONESIA UNTUK TIMOR LESTE Persahabatan untuk masa kini dan masa depan



Sistem pertahanan nasional dalam bidang kesehatan dilaksanakan untuk mendukung Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang, sesuai dengan pasal 7 UU TNI No. 34 tahun 2004. Sistem pertahanan nasional dalam sektor kesehatan menempatkan sumber daya manusia sebagai pusat kekuatan.



## NASIONALISME MASYARAKAT SEBAGAI BENTUK BELA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN KEKUATAN PERTAHANAN

Bela negara adalah pola sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.



## PERLUNYA PEMBINAAN KADER BELA NEGARA DALAM BINGKAI PERTAHANAN NEGARA INDONESIA

Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah salah satu program pemerintah dalam memelihara dan membina rasa cinta tanah air bagi seluruh Warga Negara sehingga mampu meredam masyarakat terhadap keterpengaruhannya tindakan Radikalisme.



## PERAN TNI DALAM GLOBAL HEALTH SECURITY AGENDA (GHSA)

Indonesia menyadari bahwa kerjasama internasional di bidang prevent, detect and respond dalam menghadapi ancaman penyakit menular perlu terus ditingkatkan, baik terhadap berbagai kasus yang termasuk kategori muncul secara alamiah, disengaja atau buatan manusia maupun akibat kecelakaan.



## PROFIL SATKER: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** selanjutnya disebut Balitbang, adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Balitbang dipimpin oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Ka Balitbang. Balitbang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pertahanan.

# PENGEMBANGAN POSTUR PERTAHANAN MILITER GUNA MENDUKUNG TERWUJUDNYA POROS MARITIM DUNIA

Oleh :  
Brigjen TNI Sisriadi  
Ses Ditjen Kuathan Kemhan



## LATAR BELAKANG

Pada awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan konsep Poros Maritim Dunia yang disampaikan secara terbuka di depan forum pemimpin negara-negara di kawasan Asia Timur. Artinya, konsep Poros Maritim Dunia tidak lagi menjadi janji politik presiden terpilih kepada para pemilihnya, tetapi telah menjadi visi pemerintah yang harus diwujudkan oleh segenap aparatur pemerintahan di bawahnya, termasuk di lingkungan Kementerian Pertahanan. Pada kenyataannya, visi tersebut masih terlalu umum, sehingga perlu dielaborasi menjadi satu kebijakan politik

yang dapat menjadi panduan bagi penyusunan kebijakan teknis di bidang pertahanan negara.

Setelah menunggu selama setahun, akhirnya dokumen Kebijakan Umum Pertahanan Negara pun disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015. Disahkannya Peraturan Presiden ini patut kita sambut dengan antusias karena dokumen tersebut merupakan panduan utama bagi segenap pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pertahanan negara. Bagi Kementerian Pertahanan, dokumen tersebut memiliki arti penting karena merupakan kebijakan politik pertahanan yang berisi pokok-pokok keinginan Presiden sebagai kepala negara

yang wajib dipedomani dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara. Selain itu, dokumen ini juga merupakan uraian visi pemerintah yang harus dijabarkan dalam rencana pembangunan sektor pertahanan negara.

Tulisan ini mencoba membahas berbagai aspek kebijakan di bidang pertahanan negara dalam kaitannya dengan upaya untuk mendukung terwujudnya konsep Poros Maritim Dunia yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Melalui tulisan singkat ini, penulis mencoba menawarkan gagasan tentang arsitektur pertahanan militer guna menjawab tantangan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

## DOKTRIN POROS MARITIM DUNIA SEBAGAI KONSEP GEOPOLITIK

Pengakomodasian janji politik Presiden ke dalam dokumen *grand strategy* merupakan salah satu bentuk praktik ketatanegaraan yang lumrah dilakukan di negara-negara demokratis. Maka dari itu, pembahasan konsep Poros Maritim Dunia dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dapat dipahami sebagai legitimasi visi Presiden terpilih dalam memimpin negara dan pemerintahan selama lima tahun masa kepemimpinannya. Dalam dokumen tersebut, konsep Poros Maritime Dunia yang terkandung dalam visi Presiden terpilih ditempatkan sebagai sebuah doktrin nasional, yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi politik luar negeri sebagai berikut: “Memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE, melalui strategi: (a) pelaksanaan perundingan perbatasan maritim dan darat; (b) pelaksanaan Doktrin Poros Maritim Dunia; (c) penyebarluasan informasi perbatasan termasuk perundingan kesepakatan batas kekuatan transmisi radio.”

Dengan mencermati arah kebijakan politik luar negeri yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2015-2019, maka konsep Poros

Maritim Dunia dapat dipandang sebagai konsep geopolitik yang ingin diwujudkan oleh Presiden. Konsep Poros Maritim Dunia sebagai konsep geopolitik diperkuat oleh fakta politik berupa pernyataan Presiden Joko Widodo yang disampaikan di depan para pemimpin Asia Timur pada *East Asian Summit* di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 Nopember 2014, sebagai berikut: “..... Oleh karena itu, sebagai negara maritim, Indonesia harus menegaskan dirinya sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera: Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi sebagai Poros Maritim Dunia membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerjasama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat.....”

Kedudukan Poros Maritim Dunia sebagai konsep geopolitik menuntut pemerintah untuk membangun dan mengembangkan elemen-elemen kekuatan nasional yang meliputi diplomasi, ekonomi, politik dan kekuatan pertahanan negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung. Hal ini relevan dengan konsep “Trisakti” yang mewadahi semangat perjuangan nasional yang mencakup tiga aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan, Kementerian Pertahanan bertanggung jawab untuk pengembangan kekuatan pertahanan negara yang diorientasikan untuk mendukung terwujudnya Poros Maritim Dunia.

## KONSEP POROS MARITIM DUNIA DALAM PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

Penyelenggaraan pertahanan negara pada hakikatnya adalah fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan potensi dan kekuatan pertahanan negara untuk menangkal dan menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa secara sistemik. Dalam kaitan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang pertahanan negara yang merupakan instrumen penuntun dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pada tataran politik, kebijakan di bidang pertahanan negara diatur dalam dokumen Kebijakan Umum Pertahanan



Negara yang memberikan petunjuk garis besar bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan fungsi pertahanan negara.

Dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara, konsep Poros Maritim Dunia secara resmi dijadikan salah satu pertimbangan konsepsional, khususnya dalam kebijakan pembangunan Postur Pertahanan Negara. Secara tersurat dijelaskan bahwa: "Pembangunan pertahanan negara bertujuan untuk mewujudkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur dengan prinsip defensif aktif dalam rangka menjamin kepentingan nasional. Usaha pertahanan negara diselenggarakan melalui

pembangunan postur pertahanan negara secara berkesinambungan untuk mewujudkan kekuatan, kemampuan, dan gelar. Pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) komponen utama dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya....".

Secara substantif, kebijakan tersebut masih bersifat kerangka deskriptif yang memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat benar-benar dijadikan pedoman dalam pengembangan kekuatan pertahanan sebagai salah satu pilar Poros Maritim Dunia. Untuk mewujudkan sistem pertahanan negara yang sesuai dengan konstelasi geografis Indonesia dan memiliki daya tangkal,



maka dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara harus dirumuskan secara lebih implementatif. Hal ini dimaksudkan agar dokumen tersebut dapat dijadikan landasan bagi penyusunan strategi pertahanan negara yang lebih aplikatif.

Strategi Pertahanan Negara yang aplikatif dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis nasional, regional maupun global. Selain itu, juga harus dapat mencerminkan konsep geopolitik yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Dalam kaitan inilah doktrin Poros Maritim Dunia seharusnya memberikan warna pada rumusan strategi pertahanan negara yang akan digunakan sebagai panduan

bagi pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara dalam rangka menangkal dan menghadapi ancaman.

Mengalir dari pemahaman Poros Maritim Dunia sebagai konsep geopolitik, maka konsepsi pengembangan kekuatan pertahanan negara harus selaras dengan kerangka pembangunan nasional yang komprehensif-integral. Konsep Poros Maritim Dunia harus dipahami sebagai *political intent*, yaitu suatu kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Presiden dalam menjalankan roda pemerintahannya. Secara substansial, konsep Poros Maritim Dunia telah sesuai dengan kondisi konstelasi geografis Indonesia yang berada di posisi silang dua samudera dan dua benua. Oleh karena itu, Poros Maritim Dunia harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan pemerintah pada semua tingkatan. Khusus dalam perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara, Poros Maritim Dunia bahkan harus ditempatkan sebagai *back bone* kebijakan, karena Poros Maritim Dunia merupakan konsep geopolitik yang menjadi landasan konsepsional penyelenggaraan pertahanan negara.

Salah satu elemen penting dalam Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara 2015-2019 adalah kebijakan pembangunan pertahanan negara yang mengarahkan terbentuknya Postur Pertahanan Negara dengan prinsip defensif aktif dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sejak tahun 2007, Kementerian Pertahanan telah menetapkan dokumen Postur Pertahanan Negara yang berisi tahapan pembangunan postur pertahanan negara mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2029. Dalam dokumen Postur Pertahanan Negara tersebut, faktor konstelasi geografi memang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan Postur Pertahanan. Namun sifatnya masih umum, sehingga belum memberikan kerangka kerja yang tegas bagi penyusunan arsitektur pertahanan negara. Dengan adanya konsep Poros Maritim Dunia, Kementerian Pertahanan perlu melakukan kaji ulang (review) terhadap dokumen kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, agar benar-benar memberikan gambaran yang realistik tentang postur pertahanan negara yang selaras dengan konsep Poros Maritim Dunia.

## **ARSITEKTUR PERTAHANAN MILITER DALAM POSTUR PERTAHANAN NEGARA**

Dalam dokumen postur pertahanan negara dijelaskan bahwa Kementerian Pertahanan menyiapkan postur pertahanan negara yang disusun dalam keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan negara. Postur pertahanan negara dikembangkan dari doktrin dan strategi pertahanan negara dengan memperhatikan faktor geopolitik dan geostrategi Indonesia, serta karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berupa kepulauan dengan wilayah perairan yang luas. Postur pertahanan militer dikembangkan dalam pola Tri-Matra Terpadu antara kekuatan matra darat, kekuatan matra laut, dan kekuatan matra udara.

Selanjutnya dijelaskan bahwa kekuatan pertahanan militer mencakup aspek organisasi, peralatan utama sistem senjata dan pendukungnya, serta aspek pangkalan. Sedangkan kemampuan pertahanan militer mencakup lima kemampuan utama, yaitu kemampuan intelijen, kemampuan pertahanan, kemampuan keamanan, kemampuan pemberdayaan wilayah dan kemampuan dukungan. Kekuatan pertahanan yang telah terbentuk secara profesional, kemudian dikembangkan dalam suatu gelar kekuatan pertahanan militer yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan strategi pertahanan negara guna menghadapi ancaman nyata dan menangkal ancaman potensial.

Apakah Postur Pertahanan Negara yang ada saat ini sudah menjawab tuntutan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia? Setidaknya ada tiga parameter yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu strategi pertahanan negara, postur pertahanan militer dan doktrin TNI. Pertama, strategi pertahanan negara yang menjadi acuan dalam penyusunan postur pertahanan militer yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan pada pertimbangan ancaman, sehingga secara substantif bersifat prosedural. Sedangkan pertimbangan konstelasi geografis kurang mendapat porsi yang memadai dalam rumusannya. Kedua, postur pertahanan militer lebih mengakomodasi aspek statis yang mencakup konsep kekuatan, kemampuan dan

gelar kekuatan. Pertimbangan faktor geografi dalam penyusunan postur pertahanan militer belum terefleksikan secara nyata. Hal ini dapat dilihat dari gelar kekuatan yang belum proporsional ditinjau dari aspek kematriaan dihadapkan dengan kondisi geografi Indonesia. Ketiga, konsep Tri-matra Terpadu dalam doktrin TNI "Tri Dharma Eka Karma" lebih memberikan gambaran tentang penggabungan satuan-satuan ketiga matra dalam satu komando tugas gabungan, yang komposisinya disesuaikan dengan karakteristik ancaman dan jenis operasi yang akan dilaksanakan.

Dari ketiga parameter tersebut, kita belum mendapatkan gambaran tentang arsitektur pertahanan militer yang bisa mendukung terwujudnya Poros Maritim Dunia. Secara normatif, arsitektur pertahanan militer seharusnya menjadi bagian integral yang dideskripsikan secara jelas dalam dokumen postur pertahanan negara. Arsitektur pertahanan militer dapat didefinisikan sebagai struktur dinamik yang menggambarkan hubungan diantara unsur-unsur matra yang ada dalam suatu sistem pertahanan militer. Jadi, arsitektur pertahanan militer adalah aspek dinamis dari postur pertahanan militer, yang merupakan resultan dari perpaduan antara aspek kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan pertahanan militer. Arsitektur pertahanan militer itulah yang nantinya menjadi kerangka kerja bagi perumusan konsep Tri-matra Terpadu.

Secara sederhana, arsitektur pertahanan militer dapat digambarkan sebagai perpaduan dinamis antara fungsi-fungsi peperangan yang ada dalam masing-masing matra yang dipadukan sehingga menghasilkan satu kekuatan pertahanan militer yang solid untuk menghadapi ancaman. Yang dimaksud dengan fungsi peperangan disini adalah pengelompokan kegiatan dan sistem yang memiliki kesamaan, yang digunakan oleh seorang Panglima untuk melakukan segala upaya dalam rangka mencapai tujuan peperangan. Fungsi-fungsi tersebut setidaknya mencakup (1) fungsi sensor, (2) fungsi komando dan pengendalian, (3) fungsi pemukul, (4) fungsi mobilitas, (5) fungsi proyeksi kekuatan, dan (6) fungsi dukungan.

Fungsi sensor mencakup kegiatan pengumpulan informasi/data, pengolahan informasi/data menjadi intelijen, dan distribusi

inteligensi kepada unsur-unsur lain yang ada dalam mandala operasi. Dalam rangka mewujudkan Poros Maritim Dunia, maka fungsi sensor pertahanan militer merupakan pemanfaatan dari sistem sensor TNI AU, TNI AL, TNI AD dan sistem sensor sipil yang telah dimobilisasi menurut perundangan-undangan yang berlaku.

Fungsi sensor pertahanan militer disusun secara berjenjang, mulai dari tingkat taktis, operasional sampai dengan tingkat strategis. Fungsi sensor yang handal harus memadukan sensor teknis (radar, satelit) dan sensor manusia secara proporsional. Fungsi sensor dapat diselenggarakan dengan optimal apabila didukung dengan sistem sensor yang handal, yang menggabungkan kemampuan sistem penginderaan jarak jauh yang didukung dengan teknologi informatika dan komputer serta sistem komunikasi yang aman dan terpercaya.

Untuk mewujudkan arsitektur pertahanan militer yang mampu menjawab tuntutan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim

dunia, maka pembangunan kemampuan sistem sensor pertahanan militer harus menjadi prioritas, karena sistem sensor merupakan mata dan telinga dari sistem pertahanan militer. Tanpa sistem sensor yang baik, bangunan postur pertahanan militer tidak mampu mendeteksi dan mengidentifikasi ancaman terhadap kedaulatan negara.

Selama ini, pengembangan kemampuan sensor pertahanan militer berorientasi pada peningkatan kemampuan sensor sistem pertahanan udara nasional. Pemanfaatan kemampuan sensor antar matra dilakukan pada tatataran operasional yang diatur dengan prosedur operasional oleh Komando Pertahanan Udara Nasional. Hal ini kurang menjawab kebutuhan informasi satuan-satuan matra lain dalam operasi gabungan yang bersifat Tri-matra Terpadu. Kedepan, pengembangan sistem sensor harus dilakukan secara terpadu sejak perencanaan sampai pada tahap penggelarannya, sehingga dapat lebih menjamin keterpaduan antar matra dalam



**ARSITEKTUR PERTAHANAN MILITER DALAM POSTUR PERTAHANAN**

pengoperasiannya. Untuk memperkuat sistem sensor, maka sistem penginderaan jarak jauh dengan menggunakan satelit nasional menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Penggunaan satelit nasional akan memperluas cakupan pengumpulan informasi tentang kondisi geografis mandala operasi dengan tingkat kerahasiaan yang relatif tinggi.

Fungsi komando dan pengendalian didefinisikan sebagai kegiatan penggunaan kewenangan dan kekuasaan oleh seorang komandan secara tepat terhadap satuan bawahannya atau satuan-satuan lain yang berada dibawah wewenangnya untuk melaksanakan tugas. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa komando dan pengendalian adalah pusat dari seluruh kegiatan peperangan yang dilakukan oleh satuan-satuan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kampanye militer didalam mandala perang. Fungsi ini sangat esensial dalam menentukan keberhasilan peperangan. Dalam pelaksanaannya fungsi komando dan pengendalian dilakukan oleh Panglima/Komandan yang didukung oleh sistem komando dan kendali yang meliputi fasilitas dan

peralatan, manajemen informasi, prosedur dan personel.

Keberadaan matra yang berbeda-beda dalam satu mandala peperangan mengharuskan adanya pemanfaatan fungsi-fungsi komando dan pengendalian matra menjadi satu fungsi komando dan pengendalian gabungan yang terpadu. Pemanfaatan fungsi komando dan pengendalian antar matra merupakan inti dari interoperabilitas semua unsur yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pertahanan militer.

Interkoneksi antara sistem komando dan pengendalian dengan sistem sensor merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan operasi militer dalam mengatasi kendala ruang dan waktu. Keberhasilan operasi *Neptune Spear* (yang berhasil membunuh Osama Bin Laden) merupakan contoh keberhasilan sistem komando dan pengendalian yang mampu mengatasi kendala ruang dan waktu. Dalam kaitan itu, satelit nasional didayagunakan dalam penyelenggaraan fungsi komando dan pengendalian. Selain mengatasi kendala ruang dan waktu, penggunaan satelit nasional



dalam penyelenggaraan fungsi komando dan pengendalian juga akan meningkatkan keamanan informasi yang diperlukan dalam setiap operasi militer.

Pembangunan sistem komando dan pengendalian harus dilakukan secara terpadu agar dapat menjamin terwujudnya kesatuan komando dalam operasi militer gabungan. Pembangunan sistem komando dan pengendalian juga harus dipadukan dengan pembangunan sistem sensor. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sistem pengambilan keputusan yang berlaku dalam operasi militer gabungan.

Fungsi pemukul diselenggarakan melalui serangkaian kegiatan penghancuran terhadap kekuatan lawan dengan menggunakan peralatan utama sistem senjata (Alutsista). Alutsista merupakan salah satu elemen utama dari arsitektur pertahanan militer yang dapat menghasilkan efek penggentar (*deterrance effect*) untuk mencegah niat lawan melakukan penyerangan terhadap negara lain. Oleh karena itu, pengembangan kekuatan pertahanan militer harus memberikan perhatian khusus pada pengadaan Alutsista, baik buatan dalam negeri maupun luar negeri.

Pengadaan Alutsista dalam rangka pengembangan kekuatan pertahanan militer seringkali terkendala oleh berbagai masalah. Di negara-negara berkembang, masalah klasik yang mengemuka adalah terbatasnya jumlah anggaran pemerintah, sedangkan di negara-negara maju masalahnya adalah rendahnya dukungan publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah untuk belanja militer. Oleh karena itu, setiap negara selalu berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam proses akuisisi Alutsista.

Belajar dari pengalaman negara lain, salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan membuat perencanaan kebutuhan Alutsista secara terintegrasi antar matra. Melalui perencanaan kebutuhan secara terintegrasi, maka dapat dicegah timbulnya redundansi dalam pengadaan Alutsista lintas matra. Selain itu, keuntungan lain yang diperoleh dari perencanaan secara terintegrasi adalah meningkatnya interkoneksi dan interoperabilitas pada saat dioperasikan oleh masing-masing matra di daerah penugasan.

Selain itu, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan memproduksi Alutsista di dalam negeri. Upaya pemerintah untuk memberdayakan industri pertahanan dalam negeri melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 patut mendapat apresiasi, karena dengan digunakannya produk-produk industri pertahanan dalam negeri, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran pertahanan untuk pengadaan Alutsista buatan luar negeri yang sangat esensial namun tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Fungsi mobilitas pada hakekatnya adalah penyelenggaraan kegiatan pemindahan pasukan dari satu daerah operasi ke daerah operasi lain di mandala perang untuk mendekatkan pasukan sendiri kepada musuh atau memusatkan kekuatan. Fungsi mobilitas dalam arsitektur pertahanan militer memiliki peran yang sangat krusial dihadapkan dengan luas wilayah dan kondisi geografi Indonesia yang berupa kepulauan. Penyelenggaraan fungsi ini harus didukung dengan sistem transportasi militer yang mampu memindahkan pasukan secara tepat waktu dan tepat tujuan.

Dalam terminologi militer, pemindahan pasukan dimaksudkan untuk memperpendek *operational reach* guna mendapatkan momentum dalam suatu kampanye militer. Untuk memenuhi maksud tersebut, diperlukan sistem transportasi multi moda yang mampu mengatasi rintangan geografis berupa rangkaian pulau-pulau kecil dan pulau besar. Dihadapkan dengan kondisi gelar kekuatan TNI yang ada saat ini, maka penataan gelar kekuatan harus merefleksikan kesesuaian antara karakteristik matra dengan kondisi geografi daerah operasi.

Fungsi proyeksi kekuatan adalah kegiatan penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi suatu krisis, memberikan efek tangkal dan meningkatkan stabilitas kawasan. Istilah ini digunakan oleh banyak negara dengan pengertian yang berbeda-beda, sesuai karakteristik geografi negara yang bersangkutan. Dalam konteks maritim, secara spesifik, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendefinisikan proyeksi kekuatan sebagai penggunaan kekuatan di lingkungan maritim, termasuk penggunaan kekuatan operasi militer ofensif

untuk menghancurkan kekuatan militer lawan atau mencegah militer lawan yang bermaksud mendekati pasukan sendiri. Proyeksi kekuatan maritim biasanya dilakukan dengan operasi pengendalian laut, yaitu penggunaan kekuatan laut (didukung oleh kekuatan udara dan darat secara tepat) dalam rangka mencapai tujuan militer di wilayah laut yang vital. Operasi ini antara lain dilakukan dengan menghancurkan kekuatan laut lawan, mengganggu jalur perdagangan laut lawan, mengamankan jalur laut yang vital serta mewujudkan keunggulan laut di daerah operasi.

Dalam kaitan doktrin Poros Maritim Dunia, masuknya proyeksi kekuatan dalam arsitektur pertahanan militer berpotensi mengundang polemik dari berbagai kalangan, terutama apabila dikaitkan dengan politik luar negeri bebas aktif dan doktrin/strategi pertahanan negara yang menggunakan pola defensif aktif. Dalam kaitan ini, proyeksi militer akan dipandang sebagai tindakan ofensif yang bertentangan dengan doktrin/strategi pertahanan negara. Pandangan ini dapat kita telusuri dalam dokumen Strategi Pertahanan Negara yang menjelaskan antara lain bahwa, “....Dalam pola defensif aktif, ekonomi harus menjadi instrumen untuk menekan negara lain yang mengancam Indonesia.” Pada bagian lain disebutkan bahwa, “Dalam pola defensif aktif, kekuatan militer harus dibangun untuk mempunyai kemampuan yang berdaya tangkal memadai sehingga disegani oleh negara lain.” Selanjutnya dijelaskan bahwa, “Dalam menghadapi ancaman militer negara lain, bangsa Indonesia akan mengembangkan strategi pertahanan defensif aktif. Salah satu wujud pertahanan defensif aktif adalah pengedepan diplomasi sebagai garis terluar pertahanan negara. Perang harus dapat dicegah dengan pendekatan politik penjinakan, yakni mengintensifkan usaha-usaha diplomatik.” Secara awam, uraian tersebut dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara tidak mengedepankan tindakan militer ofensif.

Konsep penangkalan dalam doktrin/strategi pertahanan negara kita juga didasarkan pada pandangan tentang prasyarat kuat dan tidaknya kekuatan Alutsista. “Sesungguhnya, penangkalan dengan cara penolakan adalah konsep pertahanan yang ideal karena pihak lawan akan membantalkan niatnya untuk



menyerang Indonesia dengan kekuatan militerinya. Penerapan konsep ini mencegah risiko perang. Namun, hal itu membawa konsekuensi pembangunan sistem pertahanan yang modern berbasis Alutsista yang canggih dan andal.” Maka memasukkan fungsi proyeksi kekuatan akan dengan mudah dipahami sebagai konsep yang bertentangan dengan pola defensif aktif.

Sebenarnya proyeksi kekuatan tidak harus dilihat sebagai elemen agresif dari doktrin/strategi pertahanan kita. Proyeksi kekuatan justru harus dilihat sebagai jawaban dari keterbatasan



kekuatan militer yang dimiliki. Dalam teori operasi, kita mengenal istilah jangkauan operasi (*operational reach*). Mabes TNI mendefinisikan jangkauan operasi sebagai jarak yang dapat dicapai/ditempuh oleh suatu kekuatan militer untuk hadir dan melaksanakan operasi. Jangkauan operasi berkaitan dengan geografi maupun pembagian elemen peperangan yang berupa penempatan kekuatan utama, cadangan, pangkalan aju beserta dukungan logistiknya. Jangkauan operasi dapat dicapai dengan peningkatan jarak capai sistem senjata, pengisian bahan bakar di udara, peningkatan daya angkut sistem angkutan yang mungkin dan pengefektifan

jalur komunikasi. Sedangkan Kementerian Pertahanan Amerika mendefinisikan jangkauan operasi sebagai berikut: "*Operational reach is the distance and duration over which a joint force can successfully employ military capabilities. Reach is fundamentally linked to culmination and is a crucial factor in the campaign planning process. Although reach may be limited by the geography surrounding and separating the opponents, it may be extended through forward positioning of capabilities and resources, increasing the range and effects of weapon systems.*"

Dari kedua pengertian tersebut, maka proyeksi kekuatan dalam arsitektur pertahanan



sumber:jakartagreater.com

militer menjadi jawaban atas keterbatasan kekuatan Alutsista untuk mengatasi kendala geografis Indonesia sebagai negara maritim. Proyeksi kekuatan tidak akan menjadikan Indonesia dianggap sebagai negara yang agresif. Proyeksi kekuatan dalam arsitektur pertahanan militer pada hakikatnya adalah implementasi dari asas ofensif sebagai salah satu asas perang yang harus dipegang teguh. Pada tataran strategis, ofensif bahkan menjadi salah satu elemen untuk merebut inisiatif sebagai salah satu faktor penentu kemenangan. Agresif dan ofensif adalah dua karakteristik yang berbeda. Agresif berkaitan dengan karakter untuk mengagresi dan menduduki, sedangkan ofensif lebih mengutamakan pada perebutan inisiatif dalam suatu peperangan.

Menurut Doktrin Cadek TNI, fungsi dukungan berkaitan dengan kemampuan dukungan militer dalam penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional serta pemberdayaan wilayah pertahanan. Fungsi dukungan memiliki spektrum yang sangat luas, baik dalam OMP maupun

OMSP. Dalam OMP, fungsi dukungan dapat mencakup dukungan operasi intelijen, dukungan operasi pertahanan udara nasional, dukungan operasi teritorial, dukungan operasi informasi, dukungan operasi PERNIKA, dukungan operasi NUBIKA, dukungan operasi SURTA, dukungan operasi khusus, dukungan operasi SAR, dan dukungan operasi pengungsian. Sedangkan dalam OMSP dapat mencakup dukungan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, dukungan operasi pengungsian dan dukungan operasi pemeliharaan perdamaian dunia.

Meskipun sifatnya mendukung fungsi-fungsi lain, fungsi dukungan memiliki peran yang sangat penting dan menentukan keunggulan apabila dikelola dengan benar. Dalam kaitan pembangunan kekuatan pertahanan militer guna mewujudkan Poros Maritim Dunia, fungsi dukungan harus dikembangkan secara tepat agar mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertahanan militer dalam rangka mendukung Poros Maritim Dunia.

## **PENGEMBANGAN ARSITEKTUR PERTAHANAN MILITER**

Sebagai elemen dinamis postur pertahanan militer, arsitektur pertahanan militer harus disusun dalam konteks penyusunan postur pertahanan militer. Dalam kaitan ini, arsitektur pertahanan militer dapat dipandang sebagai *template* bagi elemen-elemen statis postur pertahanan militer yang meliputi kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan. Agar bisa menjadi *template* bagi elemen-elemen statis postur pertahanan militer, penyusunan arsitektur pertahanan militer harus mempertimbangkan hasil analisa lingkungan strategis, khususnya yang berkaitan dengan dinamika kondisi geografi nasional.

Analisis tentang kondisi geografi nasional sangat penting dalam proses penyusunan arsitektur pertahanan militer karena dua hal. Pertama, kondisi geografi Indonesia yang begitu luas akan berpengaruh terhadap kemampuan dan batas kemampuan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi peperangan. Kedua, kondisi geografi Indonesia dengan struktur yang sangat kompleks akan berpengaruh terhadap bentuk dan karakteristik fungsi-fungsi peperangan yang berkaitan dengan opsi strategi militer yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Kegiatan penting dalam penyusunan arsitektur pertahanan militer adalah melakukan *wargaming* yang dimaksudkan untuk menganalisa pelibatan kekuatan TNI dalam operasi militer dalam rangka menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara. Apabila *wargaming* dilakukan dengan benar, maka dapat diperoleh gambaran apakah postur pertahanan militer yang ada saat ini sudah mampu menjawab tantangan tugas untuk menghadapi ancaman dihadapkan dengan kondisi lingkungan geografis negara kepulauan.

Penyusunan arsitektur pertahanan militer dalam rangka mewujudkan Poros Maritim Dunia tidak serta merta berimplikasi pada peningkatan kebutuhan Alutsisa. Karena tujuan penyusunan arsitektur pertahanan militer pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan efektivitas operasionalisasi postur pertahanan militer dalam rangka menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara. Boleh jadi akan ada

penambahan kebutuhan untuk mengoptimalkan fungsi tertentu, tapi dalam waktu yang sama perlu pengurangan fungsi lain yang berlebihan. Misalnya, penyelenggaraan fungsi sensor masih terlalu lemah, namun terjadi pemborosan sumber daya dalam penyelenggaraan fungsi dukungan sehingga diperlukan upaya penataan kembali fungsi-fungsi peperangan dalam postur pertahanan militer agar menjadi lebih proporsional.

Secara substantif, arsitektur pertahanan militer berada pada ranah strategi pertahanan militer nasional dan berperan sebagai jembatan bagi penyusunan rencana kampanye militer. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan bertanggung jawab menyusun arsitektur pertahanan militer dengan melibatkan Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan. Apabila arsitektur pertahanan militer telah tersusun dan berfungsi optimal, maka tugas berikutnya adalah melakukan kaji ulang secara periodik agar selalu mengikuti perkembangan lingkungan strategis dan perubahan kondisi geografi nasional.

## **PENUTUP**

Arsitektur pertahanan militer tidak hanya berperan dalam menguatkan postur pertahanan militer untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara, tetapi yang lebih krusial lagi adalah untuk meningkatkan daya gentar (*deterrence effect*) postur pertahanan militer terhadap pihak luar yang akan mengganggu kedaulatan negara. Dihadapkan dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan, arsitektur pertahanan militer harus disiapkan secara dini sebagai salah satu prasyarat bagi keberhasilan sistem pertahanan negara dalam mewujudkan poros maritim dunia.

Tulisan singkat ini diharapkan menjadi stimulus bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan penyusunan kebijakan pertahanan negara dan kebijakan pembangunan pertahanan negara dan kebijakan penggunaan komponen utama pertahanan negara guna menjawab tantangan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.\*\*\*

# BANTUAN KESEHATAN INDONESIA UNTUK TIMOR LESTE

## Persahabatan untuk Masa Kini dan Masa Depan

Oleh:

Kol. Kes. dr Iwan Trihapsoro, SpKK, SpKP, FINSDV, FAADV  
Kakes Koopsau I, Jakarta dan Ketua Satgas Transportasi dan Dermatologi

Sistem pertahanan nasional dalam bidang kesehatan dilaksanakan untuk mendukung Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang, sesuai dengan pasal 7 UU TNI No. 34 tahun 2004. Sistem pertahanan nasional dalam sektor kesehatan menempatkan sumber daya manusia sebagai pusat kekuatan. Pepatah “man behind the gun” menunjukkan pentingnya sumber daya manusia untuk mengatur sumber daya lainnya.

Untuk meningkatkan kemampuannya, personel kesehatan memerlukan pendidikan formal dan non formal, latihan dan pengalaman lapangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengalaman tersebut dapat dicapai melalui bakti sosial seperti pengobatan massal dan kerja bakti. TNI memiliki banyak aktivitas OMSP di dalam dan di luar negeri pada negara yang membutuhkan bantuan karena perang, konflik atau bencana alam. Bantuan kesehatan



untuk Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) merupakan salah satu dari program tersebut. Hal tersebut sangat penting bagi Indonesia untuk melaksanakan misi tersebut guna meningkatkan hubungan kerjasama antara RI dan RDTL sebagai sarana pengembangan kapasitas dan membuka peluang-peluang baru di masa depan.

## UNDANGAN DARI RDTL

Pada tanggal 9 Juli 2015, Menhan RDTL menulis surat undangan kepada Tim Medis RSPAD Jakarta untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Timor Leste. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menhan RI, Jend. Purn. Ryamizard Ryacudu, melalui pembentukan satuan tugas kesehatan yang terdiri dari personel TNI AD, AU dan AL, Puskes TNI dan Kemhan. Misi dilaksanakan dengan kapal KRI dr Soeharso

990, yang merupakan kapal Rumah Sakit dari Komando Armada Timur TNI AL.

Satuan tugas kemudian membuat petunjuk pelaksanaan misi, Surat Perintah, rapat-rapat panitia internal dan koordinasi dengan perwakilan RDTL di Jakarta. Tim aju dikirim ke Dili untuk melihat apa yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Timor Leste, spektrum penyakit, sumber daya kesehatan dan infrastruktur yang dapat digunakan. Sementara itu KRI dr Soeharso juga dipersiapkan di Koarmatim, Surabaya. Pelayanan kesehatan dilaksanakan di darat dan di kapal untuk kasus terpilih. Dua batalion kesehatan dari Kostrad dan Marinir juga turut bergabung dan akan melaksanakan pelayanan kesehatan di darat. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan umum dan spesialis termasuk pelayanan kesehatan gigi. Pasien berasal dari para veteran, anggota militer aktif dan polisi, serta penduduk Timor Leste lainnya. Sekitar perkiraan awal 2000 pasien terlayani dari tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2016.

## KAPAL RUMAH SAKIT, KRI DR SOEHARSO SHS 990

Untuk melaksanakan misi, satgas menggunakan KRI dr Soeharso. Kapal tersebut merupakan jenis kapal pendarat yang dibangun tahun 2003 di Korea dengan nama sebelumnya KRI Dalpele, dan pada tanggal 1 Agustus 2007 menjadi Kapal Rumah Sakit yang dinamai sesuai dengan nama pahlawan nasional, KRI Dr Soeharso, dengan nomor lambung 990. Bertindak sebagai Komandan Kapal adalah Letkol Laut (P) Ashari Alamsyah. KRI ini dapat membawa 75 awak kapal dan 65 personel medis. Pada saat darurat dapat membawa 400 pasukan dan 3000 penumpang.

Dengan panjang total 122 meter, lebar 22 meter dan draft 6,7 meter, KRI dr Soeharso bertenaga mesin diesel yang dapat mengangkut muatan 16.000 ton pada bobot penuh dan mencapai kecepatan 15 knot dengan jarak jelajah 8.600 mil laut. Kapal rumah sakit ini dilengkapi dengan 1 ruang UGD, 3 kamar operasi, 6 ruang poliklinik, 14 kamar pendukung dan 2 ruang rawat inap masing-masing berkapasitas 20





tempat tidur untuk wanita dan anak-anak dan satu ruang untuk pasien pria. Kepala Rumah Sakit adalah Letkol Laut (K) dr A Pudji Widodo dari Dinas Kesehatan Koarmatim. Perjalanan ini merupakan misi luar negeri pertama kerjasama dengan Kemhan. Untuk misi ini KRI SHS-990 membawa helikopter Bell 412 EP, buatan IPTN Bandung tahun 2012, milik Skuadron Udara 400 Wing 1 Puspenerbal untuk evakuasi udara. KRI juga membawa 2 Landing Craft Unit (LCU) untuk trasportasi personel dan logistik bila diperlukan.

## PERJALANAN TAK TERLUPAKAN

Satgas berkekuatan 426 personel meliputi 156 awak kapal, 51 dokter dan dokter gigi spesialis serta paramedis. Tim satgas dipimpin oleh Dirjen Kuathan, Laksda TNI Agus Purwoto dengan para wakilnya Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan Brigjen TNI dr Hardjanto, SpB, PNS drg Nora Ryamizard Ryacudu dan Kol CKM dr Asrofi S, SpBP, keduanya dari RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Sebagai Steering Committee adalah Laksma TNI dr I Dewa Gede Nalendra, SpBTKV, Karumkit dr Ramelan, Surabaya dan Kol Laut (K) dr Wiweka, Mars, Kadiskes Lantamal III sebagai Pasiops.

Setelah empat hari perjalanan dari Surabaya, akhirnya KRI merapat di pelabuhan Dili pada

tanggal 29 Januari 2016. KRI disambut oleh Dubes Indonesia untuk RDTL, Bapak Primanto Hendrasmoro, dan para pejabat RDTL yaitu Menhan, Cirilio Cristovao, Menlu Hernani Coelho, Menkes Maria do Ceu Pina dan ratusan penduduk Dili. Tarian selamat datang Checuvo dari Los Palos menyambut para tamu. Menhan RDTL Cirilo Cristovao menyatakan bahwa misi ini merupakan realisasi hubungan baik dari kedua pemerintahan. Pelayanan kesehatan dibuka secara resmi oleh Panglima AB RDTL Mayjen Lere Anan Timor. Para pejabat tinggi RDTL kemudian melaksanakan tur keliling kapal untuk melihat sarana yang akan digunakan. Sementara itu ratusan veteran, anggota militer dan polisi menunggu untuk diperiksa dan dilayani karena hari pertama diperuntukan bagi mereka dan keluarganya.

Pelayanan kesehatan dilaksanakan di dermaga pelabuhan Dili dan di dalam kapal. Pelayanan darat berupa pelayanan kesehatan umum, poli spesialis, poli gigi dan bedah minor. Batalion kesehatan mendirikan tenda lapangan dan menyiapkan gedung di pelabuhan yang digunakan sebagai poliklinik dan ruang operasi bedah minor.

Poliklinik darat terdiri dari klinik umum, gigi, THT, bedah umum, mata, penyakit dalam, saraf, anak, jantung dan kulit-kelamin. Di dalam KRI



melayani deteksi dini stroke terhadap 60 pasien di poli saraf, kamar operasi untuk operasi katarak, bedah selektif dan bibir sumbing. Beberapa dokter RDTL yang umumnya lulusan Kuba juga turut serta melayani pasien di klinik dan kamar operasi.

Pada hari pertama 765 veteran dan personel aktif terlayani termasuk pejabat teras yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan, dan 13 pasien yang dioperasi. Pada hari kedua terdapat 1955 pasien dengan 113 operasi. Hari ketiga terdapat 706 pasien dan 70 operasi. Jumlah total adalah 3426 dan 196 operasi, jumlah ini melebihi perkiraan awal yaitu 2000 pasien. Cukup mengejutkan juga bahwa terdapat 123 kasus sunat pada orang dewasa. Penduduk Timor Leste yang umumnya masih fasih berbahasa Indonesia mengatakan bahwa mereka berharap pelayanan ini dilaksanakan dalam 1-2 minggu sehingga lebih banyak warga yang terlayani.

## HARAPAN UNTUK MASA DEPAN

Xanana Gusmao yang sekarang menjabat sebagai menteri Perencanaan dan Investasi Strategis mengunjungi KRI dua kali dan mengutarakan harapan bahwa kegiatan seperti ini dapat diperluas di masa depan. Beliau mengucapkan terima kasih atas pelayanan

kesehatan yang diberikan pihak Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat menjamu para tim kesehatan saat jamuan makan malam di Plaza Timor, Dili. Xanana Gusmao mengatakan bahwa misi ini akan meningkatkan hubungan antara pemerintah Indonesia dan RDTL. Di masa depan beliau berharap kegiatan serupa untuk daerah lain di Timor Leste.

Pada hari terakhir misi, Menhan RDTL memberikan medali kehormatan atas bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada seluruh anggota satgas sebagai penghargaan atas pelayanan luar biasa yang diberikan terhadap rakyat Timor Leste. Medali kehormatan yang diberikan pada saat upacara HUT Angkatan Bersenjata RDTL diterima secara simbolik oleh Brigjen TNI dr Hardjanto, SpB mewakili personel militer dan ibu drg Nora Ryamizard Ryacudu mewakili para PNS. Menhan RI Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu hadir menyaksikan upacara dan parade tersebut.

Setelah tiga hari melayani, KRI SHS 990 dan awaknya meninggalkan pelabuhan Dili untuk misi berikutnya, meninggalkan pasien, saudara dan sahabat, selamat tinggal Timor Leste, "Obrigado barak".\*\*\*

# **NASIONALISME MASYARAKAT SEBAGAI BENTUK BELA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN KEKUATAN PERTAHANAN**

Oleh:

Kolonel Cba W. Jati Wahono

Analis Dit SDM Ditjen Kuathan Kemhan RI



Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan keanekaragaman suku, adat istiadat, agama dan budaya. Tentu tidaklah mudah bagi bangsa dengan beranekaragam tersebut merebut suatu kemerdekaan tanpa adanya rasa senasib sepenanggungan, solidaritas serta rasa persatuan dan kesatuan yang utuh. Namun perlu disadari suatu negara yang merdeka tanpa adanya suatu sikap nasionalisme yang tinggi, akan mustahil dapat mempertahankan suatu kemerdekaan yang sudah kita raih dengan jerih payah dan memakan korban sangat besar.

Entitas masyarakat madani adalah memiliki kemauan, kemampuan dan keberanian untuk

mengontrol maupun mengkritisi pemerintah secara arif dan bertanggung jawab, juga mampu menjadi penyalur dan penengah serta menjembatani kepentingan antara negara, individu maupun dengan masyarakat, bersikap jujur dan obyektif serta masyarakat yang menjunjung tinggi pluralisme (pengakuan adanya perbedaan).

Penguatan sikap nasionalisme diawali saat merebut suatu kemerdekaan dalam mencapai kemerdekaan. Dampak psikologis terhadap masyarakat adalah bentuk bela negara, sehingga masyarakat (warga negara) mengimplementasikan suatu sikap, perilaku, dan tindakan mewujudkan hak dan kewajiban

dalam pembelaan negara untuk menjamin kelangsungan dan pengembangan kehidupan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komitmen nasionalisme masyarakat sebagai bentuk bela negara telah dibuktikan secara nyata pada perjuangan merebut suatu kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Komitmen nasionalisme tersebut terus diuji dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar dan langsung atau tidak langsung untuk menjamin identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Bentuk bela negara masyarakat dilakukan guna mewujudkan warga negara, yang sekaligus memberikan kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran bela negara. Hal ini dengan membangun, membentuk sikap mental dan karakter seluruh warga negara Indonesia agar memiliki rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara serta memiliki sikap dan perilaku yang dijewali oleh kecintaan kepada negara dan bangsa. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman (pertahanan negara).

## MEMAKNAI KEUATAN PERTAHANAN.

"Kekuatan Pertahanan" dilakukan dengan mengerahkan kekuatan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara terintegrasi sebagai totalitas dalam sistem pertahanan negara. Dalam pelaksanaan penggerahan kekuatan, dilaksanakan secara menyeluruh untuk menghadapi ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida di sebagian atau seluruh wilayah Indonesia.

Pengertian Civilization (Civic society) juga berarti masyarakat atau negara yang warga negaranya hidup baik, teratur, tertib, sopan, tidak barbar, cerdas dan berkemajuan. (Nourouzzaman Shiddiqie MA. 1993, hal. 5-7 dan Prof. H. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, hal. 414).

Sebelum kemerdekaan, nasionalisme merupakan alat utama dalam kekuatan pertahanan dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Saat ini masyarakat dengan bela negaranya, sebagai komunitas bersama dengan komponen bangsa lain (komput dan komcad) berkepentingan untuk sama-sama mewujudkan kekuatan pertahanan, yakni Kekuatan pertahanan negara yang dibangun dari Komponen Utama diperkuat dengan Komponen Cadangan dan Pendukung.

Ciri yang menonjol dari kekuatan pertahanan adalah: pertama, kekuatan pertahanan yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara, kedua, kekuatan pertahanan yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif, dan ketiga, memiliki kekuatan yang mampu menghadapi ancaman dan memiliki kekuatan penangkalan sebagai negara kepulauan dalam mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD), Dan juga mempersiapkan pertahanan yang bersifat: (1) Semesta, yaitu melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional. Pertahanan yang bersifat semesta dilaksanakan melalui pertahanan militer dan nirmiliter secara sinergi, terintegrasi dan terkoordinasi untuk menghadapi ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida, (2) Mempersiapkan pertahanan defensif aktif, yaitu: Pertahanan defensif aktif merupakan pertahanan yang bersifat tidak agresif dan tidak ekspansif namun tetap mengedepankan kepentingan nasional, terdiri (a) Pertahanan defensif aktif dalam menghadapi ancaman militer, dilakukan melalui diplomasi untuk mencegah niat negara lain menyerang atau mengancam kepentingan nasional. Bersamaan dengan itu, pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter lainnya digunakan untuk memperkuat upaya diplomasi, sekaligus melakukan tahapan lanjutan apabila diplomasi mengalami kegagalan, (b) Pertahanan defensif aktif dalam menghadapi ancaman nonmiliter oleh kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan, dilakukan melalui penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan, dan (3) Menyusun pertahanan berlapis, ialah: dilaksanakan secara komprehensif, integral, dan

holistik untuk mampu menghadapi dinamika pola ancaman dalam bentuk nyata dan belum nyata. Pertahanan berlapis diimplementasikan dan dikembangkan untuk menangkal, mengatasi, dan menanggulangi berbagai hakikat ancaman, yang menyinergikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Hal ini merupakan implementasi dari pertahanan bersifat defensif aktif dan semesta yang bertumpu pada upaya pertahanan negara secara terpadu sebagai satu kesatuan pertahanan negara secara utuh dan saling mendukung dalam mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman.

## NASIONALISME SEBAGAI BENTUK BELA NEGARA.

Nilai-nilai nasionalisme bangsa mengandung kaidah atau norma yang harus tertanam dan terpatri dalam jiwa seluruh anak bangsa ini. Hal ini menunjukkan semua ucapan, tingkah laku dan tindakan manusia haruslah dijewi dengan semangat ataupun pancaran akan nasionalisme yang menyimbolkan rasa senasib sepenanggungan, solidaritas, berwawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan. Nasionalisme secara militan yang *non chauvenistis* itu telah dipupuk maupun dipelihara dalam kehidupan nasional dan praktik sehari-hari, sehingga ketika saatnya tiba sanggup untuk menuangkannya dalam suatu wadah perundang-undangan negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jika diteliti, maka sejarah masa sebelum kebangkitan nasional yaitu: perjuangan nenek moyang dalam mencapai nusantara sebagai tempat tinggalnya yang tetap dan tidak sedikit memberikan api semangat juang kepada kita di jaman modern sekarang ini. Tujuan tersebut adalah untuk memperoleh "*a place under the sun*" yang akan membawa kebahagiaan serta kerukunan dalam masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam kondisi kehidupan masyarakat dewasa ini, berbagai persoalan menerpa kian deras dan dahsyat pada kehidupan mendasar. Dengan demikian urgensi sikap nasionalisme menjadikan pondasi utama dalam menciptakan suatu bentuk bela negara untuk dapat menangkal dan menindak segal bentuk ancaman yang ingin mengganggu keutuhan kedaulatan NKRI. Krisis sikap nasionalisme bangsa menjadikan

awal bencana besar kelangsungan NKRI, hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya nasionalisme terealisasi dan tertanam pada seluruh anak bangsa. Dalam perjalanan waktu penyimpangan-penyimpangan dan degradasi nilai-nilai nasionalisme masih terus melanda pada masyarakat sebagai bagian komponen bangsa.

Namun belakangan ini sikap nasionalisme telah mengalami pergeseran, kondisi riil menurunnya nasionalisme dapat diidentifikasi sebagai berikut: Pertama, timbulnya pemberanahan terhadap agama dan kepercayaan dengan munculnya aksi terorisme. Kedua, hilangnya sifat sebagai manusia beradab



dan berbudaya yang mempunyai rasa, daya cipta dan karsa dalam menunjang kehidupan berubah menjadi tindakan-tindakan anarkhis dalam penyelesaian masalah karena terbawa situasi ketidakadilan, pelanggaran HAM dan kebebasan melaksanakan hak. Ketiga, lunturnya rasa bangga, cinta terhadap bangsa dan negara. Keempat, hilangnya sifat musyawarah untuk mufakat dengan berbagai bentuk penyelesaian masalah melalui voting, dan Kelima, timbul sifat monopoli, konglomeratisasi dan KKN dengan hilangnya rasa keadilan.

Bela negara adalah pola sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Spektrum bela negara sangat luas, dimulai dari yang paling halus, yaitu hubungan baik antar sesama warga di dalam lingkungannya, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sedang yang paling keras, yaitu wujud perilaku bekerja keras, menciptakan keamanan di tingkat sosial, memberantas KKN, melawan peredaran penyalahgunaan Narkoba, keamanan menangkal terorisme, menangkal ancaman nyata musuh Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum dan HAM, serta menjaga harkat martabat bangsa.



Bentuk bela negara dapat diwujudkan melalui nasionalisme masyarakat. Pengertian "nasionalisme" adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri.

Wujud nasionalisme (cinta tanah air/Wawasan Kebangsaan), adalah semangat kebangsaan (*national spirit*) dan kemauan kebangsaan (*national will*) yang dimiliki masyarakat tidak berorientasi kepada kesukuan, ras maupun golongan agama tertentu. Atas kepentingan negara, sikap nasionalisme menjadi pertaruhan terhadap tegaknya NKRI yang implementasinya, yaitu: (1) Semangat membela tanah air, (2) Rasa bangga menjadi bagian NKRI, dan (3) Partisipasi diri (mendukung program pemerintah), serta (4) Rela berkorban. Nilai kebangsaan dibentuk melalui kesadaran akan rela berkorban dari konsekuensi ketaatan dan kepatuhan pada peraturan yang dibuat bersama.

## MEWUJUDKAN KEKUATAN PERTAHANAN.

Kekuatan pertahanan merupakan kekuatan komponen utama (komput), komponen cadangan (komcad) dan komponen pendukung (komduk) yang diwujudkan dalam transformasi sumber daya nasional menjadi Pertahanan.

Peran masyarakat dalam mewujudkan kekuatan pertahanan adalah hak dan kewajiban ikut dalam bela negara kearah penyiapan komponen pendukung melalui kesadaran bela negara. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, masyarakat memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar serta menentukan dalam proses pembangunan bangsa dan negara, baik pada masa lalu (*past event*), masa kini dan masa mendatang. Sebagai negara dalam proses membangun kekuatan pertahanan memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara. Bentuk bela negara yang dilakukan pada dasarnya secara langsung atau tidak langsung telah memberikan dampak (*output*) pada pengembangan dan pembangunan

kekuatan pertahanan (Hanneg). Dalam pembangunan pertahanan semesta, keikutsertaan masyarakat penyelenggaraan negara antara lain adalah mendukung tegaknya kedaulatan NKRI. Masyarakat juga dibangun dikembangkan secara profesional dengan mengacu sikap nasionalisme yang dikembangkan serta merupakan bagian kekuatan pertahanan.

Peran ini diwujudkan masyarakat dalam bentuk bela negara, antara lain: Pertama, rela berkorban. Nilai kebangsaan dibentuk melalui kesadaran akan rela berkorban dari konsekuensi ketaatan dan kepatuhan pada peraturan yang dibuat bersama. Kedua, jiwa pratiotisme. Watak Patriotisme dan Kejuangan (*character struggle*), serta orientasi masyarakat (warga negara) patriotik adalah hanya untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Yang terbaik bagi bangsa dan negara itulah yang terbaik bagi masyarakat (warga negara) sebagai komponen bangsa. Api semangat patriotisme bangsa terbakar apabila tatanan kehidupan masyarakat suku bangsa terasa terusik. Ketiga, jiwa persatuan dan hilangnya sifat primordialisme/ kedaerahan. Bangsa Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk, yaitu negara yang dibangun dengan cara mempersatukan masyarakat suku bangsa menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara NKRI oleh sistem dan pemerintah nasional, dan keempat, komitmen Pengabdian yang Tinggi. Komitmen merupakan perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu kontrak. (Depdiknas: 2005, hal. 452).

Kontrak pengabdian masyarakat saat ini adalah bentuk bela negara, yang dituntut secara hukum mempunyai hak dan kewajiban membela negara dengan tidak melakukan





kegiatan kekerasan (*the day without violence*), antara lain sebagai berikut: (a) Adanya kekurang seimbangnya kesetaraan derajat sesama masyarakat suku bangsa. (b) Belum terakomodasinya kebebasan mengeluarkan aspirasi. (c) Munculnya sifat perilaku individualisme dan individualitas kehidupan masyarakat suku bangsa yang mencolok. (d) Kecenderungan melebarnya jurang toleransi atas perbedaan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. (e) Bentuk keseimbangan penyelesaian konflik dan konsensus dari akhir konflik. (f) Ketidakpastian dan ketidakadilan hukum pada masyarakat suku bangsa menimbulkan klaim bahwa hukum berlaku

bagi masyarakat kecil, dan (g) Adanya rasa patriotisme semu dengan melakukan tindakan-tindakan terorisme yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Uraian tersebut di atas, mengisyaratkan bahwa, kontribusi masyarakat secara nyata telah dan akan selalu diberikan dalam mewujudkan terbentuknya kekuatan pertahanan, yaitu masyarakat yang mempunyai semangat membela tanah air, rasa bangga menjadi bagian NKRI, dan partisipasi diri (mendukung program pemerintah), serta rela berkorban demi pembangunan bangsa dan negara serta tegaknya NKRI.\*\*\*

# **PERLUNYA PEMBINAAN KADER BELA NEGARA DALAM BINGKAI PERTAHANAN NEGARA INDONESIA**

Oleh:

Kol. Inf. F. Hari Moelyono, S.E  
Auditor Madya Itjen Kemhan RI

PKBN (Pembinaan Kesadaran Bela Negara) adalah Salah satu program pemerintah dalam memelihara dan membina rasa cinta tanah air bagi seluruh Warga Negara. PKBN harus direncanakan dengan bersinergi dengan program instansi terkait lainnya, sehingga selain mencintai tanah air juga akan mampu meredam keterpengaruhannya masyarakat terhadap pengaruh tindakan Radikalisme. PKBN juga menyentuh masyarakat wilayah perbatasan, dengan memaksimalkan kerjasama secara terpadu antar Kementerian/Lembaga terkait. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan sekaligus meningkatkan

rasa cinta tanah air dan bangga sebagai warga negara Indonesia, pemerintah menyiapkan program yang nyata dan berkesinambungan.

## **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa "setiap warga Negara BERHAK dan WAJIB ikut serta dalam upaya PEMBELAAN NEGARA". Pasal 30 ayat (1) berbunyi setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara.



2. Perpres No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 dalam Bab VI tentang Pertahanan dan keamanan disebutkan dalam rangka terbangunnya sistem keamanan Nasional yang terintegrasi, salah satunya melaksanakan arah kebijakan meningkatkan kesadaran, sikap dan perilaku bela negara di masyarakat melalui Strategi Pendidikan Bela Negara.
3. Perpres No 97 Tahun 2015 tentang kebijakan Umum Pertahanan negara Tahun 2015-2019 lampiran angka 3 huruf a 9) tentang pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap WNI untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Lampiran 3 huruf b 6) tentang Pemberdayaan Kemandirian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kesaaran bela Negara.
4. Kesepakatan bersama antara Kemhan dengan Kemenkopolhukam, Kemdagri, Kemen PAN & RB, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Polri dan Kwarnas Gerakan Pramuka, tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

## **PERMASALAHAN BELA NEGARA YANG MENONJOL.**

Pendidikan Bela Negara dilaksanakan secara berkesinambungan dan telah menghasilkan banyak *Leader*. Namun masih ada kekurangan dan permasalahan yang perlu penanganan secara komprehensif, seperti:

1. Masih sedikit masyarakat yang mengerti tentang makna dan arti Kesadaran Bela Negara. Hal ini diakibatkan rentang pemahaman yang bervariasi.
2. Dalam kegiatan PKBN (Pembinaan Kesadaran Bela Negara) hasilnya belum optimal, karena keterbatasan tenaga kader pendidik dan infrastruktur.
3. Pemahaman tentang pelaksanaan Bela

Negara di salah artikan dengan kegiatan Militerisme.

Berbagai permasalahan ini, secara bertahap diatasi dengan kebijakan Kemhan yang menempatkan bela negara sebagai program prioritas.

## **UPAYA MENGATASI DAN MENINGKATKAN PELAKSANAAN PEMBINAN BELA NEGARA.**

1. Masih sedikitnya masyarakat yang mengerti tentang makna dan arti Kesadaran Bela Negara karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Pertahanan dan keamanan negara yang bertanggung jawab adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja. Padahal dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa "setiap warga Negara BERHAK dan WAJIB ikut serta dalam upaya PEMBELAAN NEGARA, upaya yang dilakukan dalam memberikan pemahaman Kesadaran bela Negara adalah:
  - a. Kesadaran Bela negara tidak tumbuh dengan sendirinya akan tetapi harus ditanamkan sejak dini, metodenya bisa melalui pendidikan sekolah, Lingkungan pekerja dan pemukiman. Bela negara adalah sebagai bentuk revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi berbagai masalah bangsa dan ancaman negara lain serta menghindari tindakan Radikalisme. Upaya yang paling mendasar adalah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tergerak mencintai negaranya dan sadar akan hak dan kewajibanya untuk membela negara.
  - b. Memberi contoh dan tauladan dengan memotivasi sikap dan pola pikir warga agar dapat merubah karakter dan termotivasi untuk bangkit dari keterpurukan dan sadar bahwa mereka juga mempunyai Hak dan Kewajiban membela Negara, rasa bangga dan terhormat jika mereka dapat mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya demi kepentingan umum, niscaya masyarakat mau "berjibaku" demi membela negara dan bangsanya.
2. Kegiatan PKBN (Pembinaan Kesadaran Bela



Negara) hasilnya belum maksimal. Hal ini disebabkan karena belum terintegrasinya L/K/I tentang materi PKBN. Melalui pendidikan kader yang dilaksanakan baik berpusat maupun tersebar oleh Kemhan diharapkan akan semakin komprehensifnya pemahaman terhadap bela negara. Upaya dalam pemantapan pelaksanaan PKBN :

- a. Di Lingkungan Pendidikan : kementerian pendidikan sebagai *Leading sector* dapat mengawali mensosialisasikan kurikulum pendidikan bela negara seperti materi intrakurikuler yaitu: Pendidikan Moral Pancasila, Kewarganegaraan dan sejarah nasional untuk kegiatan ekstrakurikuler

bisa berupa ketrampilan pramuka, Palang merah Remaja, Kesenian dll. Bisa juga dalam bentuk kegiatan yang aplikatif seperti pelatihan tanggap bencana (SAR), memperingati hari besar nasional. Kegiatan sederhana seperti ini perlu dilatihkan secara terus menerus sepanjang tahun untuk mendapatkan pembangunan karakter bangsa dengan hasil yang optimal.

- b. Di lingkungan Pekerjaan: Kegiatan pendidikan Bela Negara dilakukan dengan kegiatan: Di Interen perkantoran, pemimpinya dapat pembekalan kepemimpinan Nasional, untuk karyawan



mengikuti kepelatihan Bela negara yang diselenggarakan secara terpusat. Namun diperlukan peran kementerian Tenaga kerja sebagai *Leading sector* mendorong perusahaan membekali karyawannya dengan bela negara. Sehingga secara psikis dan fisik semua pegawai sudah siap terlibat dalam latihan Bela negara secara terarah , terukur dan professional.

c. Di lingkungan Pemukiman: Perbedaan kultur serta tingkat pendidikan akan berpengaruh dalam penerapan metoda, program harus Fleksibel dan tidak terkesan mendikte atau menggurui karena kemajemukan latar belakang pekerjaan

dan pendidikan tadi. Berkomitmen dalam kehidupan social serta mau terlibat dalam kegiatan seperti siskamling akan membuat warga saling mengenal, saling menjaga, saling peduli, sehingga dapat mengeliminir kemungkinan konflik sosial serta dapat menangkal setiap gangguan dan ancaman dari luar wilayah, disinilah awal terbentuknya pembangunan karakter Bangsa yang bermoral dan bermartabat.

3. Masih adanya pemahaman tentang Bela Negara sama dengan kegiatan Militerisme. Hal ini terjadi karena adanya sekelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak setuju adanya pelaksanaan Pembinaan Kader Bela Negara. Upaya untuk mensosialisasikan pembinaan KBN:
  - a. Mensosialisasikan kepada semua elemen bangsa, bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban dan harus ikut partisipasi dalam pembangunan nasional. Pembinaan KBN bukanlah kegiatan Militerisasi, tidak harus di didik ala militer serta tidak dilatih untuk berperang yang di konsentrasi disuatu kamp Militer. Opini ini yang harus di hapus, langkah yang telah ditempuh oleh Kemenhan adalah membentuk Kader Bela Negara (KBN) dari masyarakat sipil yang dididik sebagai Kader, diharapkan mereka dapat melanjutkan dan meneruskan secara tersebar pendidikan dan pelatihan yang telah diterima kepada masyarakat lainnya di setiap kabupaten/kota asal mereka.
  - b. Membangkitkan dan mendorong rasa nasionalisme melalui ekspresi cinta tanah air. KBN dilaksanakan di lingkungan pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang materinya disesuaikan dengan tingkatannya. Dilingkungan pekerja dan pemukiman, (lingkungan keluarga, masyarakat rt/rw, kecamatan dst sampai tingkat propinsi), dan lingkungan pekerjaan ( seluruh warga yg sudah bekerja). Contoh nyata secara sederhana, di lingkungan tingkat TK dan SD, secara dini mereka dididik dan diperkenalkan dengan mengenal



lambang negara, lagu kebangsaan, mengenal gambar para pahlawan bangsa, mengenal sesama warga, dan saling sapa berhubungan baik satu sama lain, Pembinaan Kesadaran Belanegara merupakan “soft power” bangsa yang akan memberikan “Deterrent effect”.

## PENUTUP.

Dari pembahasan yang telah di laksanakan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Sasaran Pembinaan Kesadaran Bela

Negara adalah menumbuh kembangkan rasa cinta Tanah Air, Kesadaran berbangsa dan bernegara, Yakin akan Pancasila sebagai Idiologi Negara, Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara dan memiliki kemampuan awal bela negara.

- b. Pembinaan KBN merupakan sarana pembentukan disiplin masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari hari sehingga membentuk masyarakat yang rela berkorban demi kepentingan Negara



serta terbentuknya Karakter bangsa yang bermoral dan bermartabat.

c. Kemunduran dan kehancuran suatu Bangsa disebabkan oleh ketidakmampuan para pemimpin yang tidak dapat melakukan pewarisan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada generasi muda penerusnya.

#### SARAN.

a. Perlu penguatan peraturan atau UU yang mengatur pelaksanaan kegiatan bela negara secara konprehensif.

- b. Perlunya melengkapi piranti lunak, dan piranti keras pelaksanaan sosialisasi PKBN dilengkapi dengan metoda proses belajar mengajar, kepelatihan yang terkini serta kesiapan komponen Pendidikan.
- c. Perlu diberdayakan Lembaga pendidikan milik K/L/I terkait di daerah ikut terlibat aktif mendukung pelaksanaan latihan PKBN.\*\*\*

# **PERAN TNI DALAM *GLOBAL HEALTH SECURITY AGENDA* (GHSA)**

Oleh :

Kol. drg. Buyung Nazeli, MARS

Kasubdit Nakes Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan

dan

Kol Kes dr Iwan Trihapsoro, SpKK, SpKP, FINSDV, FAADV

Kakes Koopsau I, Jakarta



## **PENDAHULUAN.**

Tingginya tingkat interaksi individu pada masa kini telah memunculkan tingkat kerawanan terkait kemungkinan merebaknya berbagai penyakit menular. Namun demikian, tingginya tingkat interaksi tersebut memunculkan peluang kerjasama internasional yang sangat erat negara-negara di dunia dalam penanganan penyakit. Isu kesehatan publik seyogyanya dibahas secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai aspek lainnya, termasuk aspek keamanan

internasional, terutama mengingat kedua isu tersebut memiliki keterkaitan yang erat khususnya dalam konteks isu global health security. (Edi Yusup, Deputi Wakil Tetap RI pada PBB di Jenewa).

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia menjadi salah satu dari 29 negara yang saat ini tergabung di dalam inisiatif *Global Health Security Agenda* (GHSA) yang telah diluncurkan sejak bulan Februari 2014 oleh Amerika Serikat serta *World Health Organization*/WHO. Indonesia menyadari

bahwa kerjasama internasional di bidang *prevent, detect and respond* dalam menghadapi ancaman penyakit menular perlu terus ditingkatkan, baik terhadap berbagai kasus yang termasuk kategori muncul secara alamiah, disengaja atau buatan manusia maupun akibat kecelakaan.

GHSA merupakan suatu upaya oleh negara, organisasi internasional dan masyarakat sipil untuk mempercepat kemajuan menuju dunia yang lebih sehat dan aman dari ancaman penyakit infeksi menular. Hal ini untuk mempromosikan keamanan kesehatan global sebagai prioritas internasional dan untuk mempercepat penerapan Peraturan Kesehatan Internasional Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization (WHO), International Health Regulations 2005 (IHR)*), Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (*OIE*), Unjuk kerja Pelayanan Hewan (*Performance of Veterinary Services (PVS)*) dan kerangka kerja keamanan kesehatan global lainnya.

GHSA dibentuk pada 13 Februari 2014, setelah 29 negara, Uni Eropa, WHO, FAO dan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia sepakat mewujudkan dunia yang mampu untuk mencegah, mendeteksi, dan segera merespons ancaman penyakit menular, baik secara alamiah, sengaja, ataupun tidak disengaja.

### **DEFINISI GLOBAL HEALTH SECURITY.**

WHO mendefinisikan *Global Health Security* (GHS) sebagai usaha-usaha yang dibutuhkan untuk mengurangi kerentanan manusia di seluruh dunia terhadap penyebaran resiko penyakit yang akut dan baru yang dapat mengancam kesehatan dan khususnya mengancam mereka yang akan melintasi perbatasan internasional. Istilah GHS digunakan untuk menggambarkan kapasitas yang dibutuhkan suatu negara untuk mempersiapkan dan merespon ancaman kesehatan masyarakat dan mengurangi resiko ancaman tersebut dari kemungkinan melewati perbatasan negara.



Ancaman dunia terhadap penyakit seperti Ebola dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERS-CoV) yang menyebar dari manusia ke manusia dan melewati perbatasan mengakibatkan resiko kesehatan publik terhadap seluruh negara. Resiko ini menjadi tinggi untuk negara-negara miskin dan berkembang karena sistem pencegahan, deteksi dan respon cepatnya belum cukup baik untuk merespon ancaman kesehatan masyarakat yang timbul.

## TUJUAN GHSA.

GHSA merupakan kerangka yang menyatukan untuk memperbaiki respon global terhadap ledakan atau wabah penyakit serta menutup celah dalam pengamatan dan respon sehingga ancaman penyakit dapat dihentikan sedini mungkin. GHSA dibangun diatas program yang telah ada dan mempercepat penerapan program kerja WHO, OIE, FAO dan kerangka kerja global lainnya yang terkait. Secara spesifik GHSA akan merangsang investasi dan memperkuat negara,

organisasi internasional dan memasyarakat sipil untuk bekerja sama mencapai tujuan berupa:

1. Mencegah epidemi yang dapat dihindari, termasuk wabah yang timbul secara alamiah, sengaja atau akibat kecelakaan/tidak disengaja.
2. Mendeteksi ancaman secara dini, meliputi deteksi, karakterisasi dan laporan transparan terhadap ancaman biologis sedini mungkin
3. Merespon dengan cepat dan efektif terhadap ancaman biologis yang menjadi perhatian internasional.

Pada pertemuan GHSA di Helsinki, Finlandia pada tanggal 5-6 Mei 2014 dihasilkan *GHSA Action Packages and Commitment* yang dijadikan rujukan di tingkat global untuk mengatasi ancaman penyebaran penyakit infeksi. Komitmen dari 3 tujuan dan 11 paket tindakan tersebut adalah:





#### **Prevent:**

1. Antimicrobial Resistance,
2. Zoonotic Diseases,
3. Biosafety Biosecurity,
4. Immunization.

#### **Detect:**

1. National Laboratory System,
2. Real-time Surveillance,
3. Reporting,
4. Workforce Development.

#### **Respond:**

1. Emergency Operations Centers,
2. Linking Public Health with Law and Rapid Response,
3. Medical Countermeasures and Personal Deployment.

#### **KEPEMIMPINAN RI DALAM GHSA.**

GHSA Steering Group bertugas mengawasi perkembangan, mengidentifikasi tantangan dan melihat penerapan program untuk mencapai tujuan GHSA. GHSA Steering Group terdiri dari 10 negara dengan kepemimpinan yang bergantian. Steering Group terdiri dari Kanada, Chili, Finlandia, India, Indonesia, Italia, Kenya, Kerajaan Saudi Arabia, Republik Korea dan Amerika Serikat. Untuk tahun 2015 Finlandia adalah ketua. Amerika Serikat menjadi ketua pada tahun 2014. Indonesia bertindak sebagai ketua pada tahun 2016. Sebagai tambahan, WHO, FAO dan OIE akan bertindak sebagai penasehat tetap GHSA Steering Group dan masing-masing akan bertugas sebagai perwakilan sesuai bidangnya.

#### **TUGAS POKOK TNI**

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap



bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI menyebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu ; menegakkan kedaulatan negara; mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dalam hal penyakit global yang dapat mengancam kesehatan masyarakat Indonesia maka sesuai tugas pokok tersebut, TNI bertanggung jawab untuk ikut terlibat secara langsung bersama berbagai instansi pemerintah dan seluruh komponen masyarakat, untuk melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon

yang cepat. Keterlibatan TNI secara langsung adalah melalui keanggotaan TNI dalam badan nasional GHSA, dimana Indonesia menjadi salah satu Ketua Troika GHSA bersama Amerika Serikat dan Finlandia. Melalui program kerja yang ditetapkan, TNI akan mendukung kegiatan GHSA di forum internasional, nasional dan dalam tubuh TNI itu sendiri. Penjabaran program kerja GHSA bagi TNI akan dilakukan di tingkat Kementerian Pertahanan RI, Puskes TNI dan Kesehatan Angkatan. TNI akan menjalin kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga negara lain untuk menukseskan program GHSA.

### **IMPLEMENTASI GHSA DI TNI.**

Saat ini TNI yang ikut serta dalam program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan memiliki jaringan Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lain di seluruh Indonesia. Rumah sakit yang dimiliki TNI adalah; TNI AD 84 RS, TNI AL 25 RS , TNI AU 23 RS, Kemhan 1 RS. Disamping itu TNI juga memiliki lembaga-lembaga kesehatan di angkatan, seperti Lembaga Kesehatan Militer (TNI AD), Lembaga Kesehatan Laut (TNI AL)

dan Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa (TNI AU). Disamping lembaga kesehatan yang bersifat matra angkatan, di tiap angkatan juga memiliki Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut serta Lembaga Farmasi yang mampu memproduksi obat-obatan untuk kebutuhan TNI.

Agar program kerja GHSA dapat terlaksana dengan baik maka harus dimasukkan dalam Program Kerja dan Anggaran di tiap angkatan, Mabes TNI dan Kemhan. Dengan demikian akan menjadi program kerja yang harus dilaksanakan oleh direktorat/Dinas Kesehatan Angkatan maupun Puskes TNI dan Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan.

Di tingkat Kemhan maka dapat dibentuk desk/Pokja GHSA yang mengkoordinir kegiatan GHSA bersama dengan Puskes TNI. Dalam pelaksanaan sehari-hari desk ini sebaiknya dipimpin oleh Sekjen Kemhan dan bertanggung jawab langsung kepada Menhan RI. Kemhan berfungsi sebagai pembuat kebijakan, sedangkan Puskes TNI sebagai pelaksana kegiatan strategis yang mengkoordinir kesehatan angkatan yang akan bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Payung hukum diperlukan sebagai dasar pelaksanaannya. Adanya suatu Keputusan Presiden terhadap GHSA, sebagaimana keanggotaan Indonesia dalam ICMM, akan memudahkan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat lintas kementerian dan lembaga serta keterpaduan matra angkatan. Di TNI akan dijabarkan dengan keluarnya Skep Panglima TNI untuk menunjuk para perwira yang bertugas mengawaki keanggotaan GHSA di tingkat nasional. Mereka akan bertugas day to day untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan GHSA.

Di Kesehatan Angkatan akan dijabarkan dalam program kerja Direktorat/Dinas Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat Mabes Angkatan sebagai koordinator yang dilaksanakan oleh RS atau lembaga kesehatan matra, sesuai bidangnya dengan bekerja sama dengan dinas terkait lain di daerahnya masing-masing. Contohnya di daerah, RS TNI dapat bekerja sama dengan dinas karantina pelabuhan udara/laut/tapal batas,

rumah sakit daerah, dinas pertanian, dinas sosial dll dalam mengawasi, mencegah, mendeteksi dan menanggulangi wabah penyakit.

Lembaga farmasi TNI, juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan vaksin atau obat lain yang diperlukan untuk mengatasi wabah penyakit tertentu. Disamping itu dapat dimanfaatkan untuk survillance wabah penyakit.

Jadi kesehatan angkatan dapat membuat program untuk membangun sistem manajemen kedaruratan dan bencana alam, pelacakan penyakit wabah, pengawasan penyakit, kontrol infeksi, deteksi kuman patogen, perawatan dan pengobatan, pendidikan dan latihan dan lain-lain disesuaikan dengan 11 paket, untuk mencegah, deteksi dan merespon.

Kesehatan TNI saat ini mengetuai ICMM untuk tahun 2015-2017. Kedudukan yang sangat strategis ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jaringan dan kerjasama dengan kesehatan militer negara-negara anggota ICMM.

## KESIMPULAN.

*Health security* tidak semata-mata tugas TNI namun TNI bertanggung jawab penuh terhadap adanya suatu tingkat keamanan terhadap ancaman Nuklir, Biologi dan Kimia (Nubika). TNI akan dan harus mendukung keanggotan Indonesia sebagai Ketua Troika GHSA melalui implementasi dari 3 tujuan dan 11 paket tindakan dari GHSA Action Packages and Commitment. Program GHSA harus masuk dalam program kerja yang terstruktur dan memiliki dasar hukum yang kuat agar pelaksanaannya bersifat *mandatory*, yang terukur, terencana, terarah, transparan dan berkesinambungan.\*\*\*

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMHAN



## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

Badan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Balitbang, adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Balitbang dipimpin oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Ka Balitbang. Balitbang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pertahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balitbang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan meliputi strategi, sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat peralatan pertahanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Balitbang.

## STRUKTUR ORGANISASI

Balitbang terdiri atas Sekretariat dan empat Pusat Penelitian dan Pengembangan:

### 1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan.

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Set Balitbang adalah unsur pembantu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

dipimpin oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan disebut Ses Balitbang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Balitbang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Set Balitbang menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- b. pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
- c. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi dan perpustakaan serta pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data Badan;
- d. pengelolaan keikutsertaan Badan dalam fora nasional dan internasional di bidang pengetahuan dan teknologi;
- e. pengelolaan kerja sama kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan Badan koordinasi penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang pertahanan;
- f. penyiapan bahan administrasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia peneliti Badan; dan koordinasi dan supervisi staf.

Set Balitbang terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Laporan,
- b. Bagian Data dan Informasi,
- c. Bagian Koordinasi Penelitian dan Pengembangan,
- d. Bagian Umum,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan.**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan selanjutnya disebut Puslitbang Strahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan selanjutnya disebut Kapuslitbang Strahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang strategi pertahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pus Litbang Strahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang lingkungan strategi, doktrin, sistem dan metoda, serta wilayah negara;
- b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang lingkungan strategi, doktrin, sistem dan metoda, serta wilayah negara serta memberikan rekomendasi;
- c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan, informasi ilmiah di bidang lingkungan strategi, doktrin, sistem dan metoda, serta wilayah negara;
- d. pembinaan kelompok jabatan fungsional peneliti di lingkungan Pusat; dan
- e. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Puslitbang Strahan terdiri atas:

- a. Bidang Lingkungan Strategi,
- b. Bidang Doktrin, Sistem dan Metoda,
- c. Bidang Wilayah Negara ,
- d. Subbagian Tata Usaha, dan,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



## **3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan.**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan selanjutnya disebut Puslitbang Sumdahan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan disebut Kapuslitbang Sumdahan mempunyai tugas melaksanakan



penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sumber daya pertahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Puslitbang Sumdahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sumber daya

manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana pertahanan;

- b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana pertahanan, serta memberikan rekomendasi;

- c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan, informasi ilmiah di bidang sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana pertahanan;
- d. pembinaan kelompok jabatan fungsional peneliti di lingkungan Pusat; dan
- e. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Puslitbang Sumdahan terdiri atas:

- a. Bidang Sumber Daya Manusia,
- b. Bidang Sumber Daya Alam dan Buatan,
- c. Bidang Sarana dan Prasarana,
- d. Subbagian Tata Usaha,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan.**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan selanjutnya disebut Puslitbang Iptekhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan disebut Kapuslitbang Iptekhan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan yang bersifat riset dasar dan difusi teknologi serta melaksanaan presentasi, demonstrasi, materiil dan atau jasa, dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi.

Dalam melaksanakan tugas Puslitbang Iptekhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan



- pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan di bidang daya gerak, daya tempur, perbekalan dan komunikasi serta elektronika;
- b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang daya gerak, daya tempur, perbekalan dan komunikasi serta elektronika, serta memberikan rekomendasi;
  - c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta informasi ilmiah di bidang daya gerak, daya tempur, perbekalan dan komunikasi serta elektronika;
  - d. pelaksanaan presentasi, demonstrasi dan uji coba materiil dan atau jasa, dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi;
  - e. pembinaan kelompok jabatan fungsional peneliti di lingkungan Pusat; dan
  - f. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Puslitbang Iptekhan terdiri atas:

- a. Bidang Daya Gerak,
- b. Bidang Daya Tempur,
- c. Bidang Perbekalan, Komunikasi dan Elektronika,
- d. Subbagian Tata Usaha,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan selanjutnya disebut Puslitbang Alpalhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan disebut Kapuslitbang Alpalhan mempunyai tugas melaksanakan dan mensinergikan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan

utama matra darat, laut dan udara yang mengarah ke prototipe dan produksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Puslitbang Alpalhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, sinergitas dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama matra darat, laut dan udara;
- b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama matra darat, laut dan udara serta memberikan rekomendasi;
- c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta informasi ilmiah di bidang pengembangan alat peralatan utama matra darat, laut dan udara;
- d. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Badan Litbang Angkatan sesuai matra;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional peneliti dan perekayaan di lingkungan Pusat; dan
- f. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Puslitbang Alpalhan terdiri atas:

- a. Bidang Matra Darat,
- b. Bidang Matra Laut,
- c. Bidang Matra Udara,
- d. Subbagian Tata Usaha,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.





www.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

# WiRA

Volume 59 / No. 43 / March-April 2016

## PREPARING MILITARY DEFENSE POSTURE IN SUPPORT OF GLOBAL MARITIME FULCRUM



**INDONESIA MEDICAL ASSISTANCE TO  
REPUBLIC DEMOCRATIC OF TIMOR LESTE**

**NATIONALISM OF THE COMMUNITY AS A FORM  
OF STATE DEFENSE TO ESTABLISH DEFENSE  
STRENGTH**

**THE NEED TO MANAGE STATE DEFENSE  
CADRE WITHIN INDONESIA'S NATIONAL  
DEFENSE FRAMEWORK**

**THE ROLE OF TNI IN GLOBAL HEALTH  
SECURITY AGENDA (GHS)**

**PROFILE OF RESEARCH AND  
DEVELOPMENT AGENCY OF MoD**

ISSN 1693-0231



ENGLISH

PT-01  
SEN



*Editorial*

Dear Readers,

We're back to greet you with the latest edition of Wira, March-April 2016. In this edition, the editorial team has made slight changes in both the presentation as well as the content. The purpose is to make the magazine look fresher and more excellent, and to accommodate your wish that the magazine contains more articles and news. In this edition, the editorial team theme Preparing Military Defense Posture in support of Global Maritime Fulcrum. Strengthening state defense continues to be the focus of the Ministry of Defense, then in this issue several articles such as nationalism as a form of defending the country, the need to manage state defense cadre. Some of the activities together with TNI will also presented as additional information: Medical Assistance to Timor-Leste and the role of TNI in the Global Health Security Agenda (GHSA). As the closing, the profile of Research and Development of the Ministry of Defense will be presented.

WIRA readers,

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, informations, responses, or critics and recommendations. For those who want to have WIRA magazine, please contact our editorial team through email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). WIRA magazine can also be accessed online in [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id). May you all take advantage of this March-April 2016 edition of WIRA magazine.

# Contents

## EDITORIAL BOARD

### Advisors:

Minister of Defense  
General (Ret.) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD  
Vice Admiral Widodo, M.Sc

### Editor in Chief:

Head of Public Communication Centre  
of MoD  
Brig. Gen. Djundan Eko Bintoro, M.Si  
(Han)

### Managing Editor:

Chief of Information Cooperation of  
Public Communication Centre  
Col. Drs. Sylvester Albert Tumbol, M.A.

### Editor:

Ltc. Joko Riyanto, M.Si.

Mutiara Silaen, S.Ikom, M.AP

### Graphic Design:

1<sup>st</sup> Lt. Farah Merila S, S.Kom.

Imam Rosyadi

### Photo:

Photographer of Public Communication  
Centre of MoD

### Circulation:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Published by:  
Public Communication Centre of MoD,  
Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

## PREPARING MILITARY DEFENSE POSTURE IN SUPPORT OF GLOBAL MARITIME FULCRUM



By setting global maritime fulcrum concept, the government is obliged to develop elements of national power, including diplomacy, economic, politics and military. This is relevant to the concept of "Trisakti".

## INDONESIA MEDICAL ASSISTANCE TO REPUBLIC DEMOCRATIC OF TIMOR LESTE Friendship for the Present and Future



National defense system in medical field is conducted to support Operation Military War (OMW) and Operation Other Than War (OOTW) according to article 7 Indonesia Defense Force Law No. 34, 2004. National defense system in medical sector put the human resources as a core of strength.



## NATIONALISM OF THE COMMUNITY AS A FORM OF STATE DEFENSE TO ESTABLISH DEFENSE STRENGTH

State defense is a pattern of citizen's behavior and attitude resulted from love to the Republic of Indonesia (NKRI) that is based on Pancasila and 1945 Constitution in order to ensure survival of nation and state.



## THE NEED TO MANAGE STATE DEFENSE CADRE WITHIN INDONESIA'S NATIONAL DEFENSE FRAMEWORK

State Defense Development Awareness Program is a government program focused on maintaining and fostering love for the country to reduce radicalism's impacts.



## THE ROLE OF TNI IN GLOBAL HEALTH SECURITY AGENDA (GHSA)

Indonesia realizes that international cooperation in prevent, detect and respond to infectious diseases threat has to be improved whether it is intended for naturally occurring, deliberate or man-made, or accidental/unintentional cases.



## PROFILE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY OF MoD

Balitbang is supporting element of the tasks and functions of the Ministry. It is under and responsible to the Minister. Balitbang is led by the Chief of Research and Development Research (Ka Balitbang) whose tasks are carrying out defense research and development.

# **PREPARING MILITARY DEFENSE POSTURE IN SUPPORT OF GLOBAL MARITIME FULCRUM**

By :

Brigadier General TNI Sisriadi  
Secretary of Directorate General of Defense Strength of MoD

## **BACKGROUND**

At the beginning of his administration, President Joko Widodo has endorsed the concept of global maritime fulcrum presented openly before East Asian Summit. Therefore, the concept of global maritime fulcrum is no longer the president's political promises to their constituents, but it has become government's

vision to be implemented by his administration, which includes Ministry of Defense. In fact, the vision is still too general; hence, it needs to be elaborated into a clear political guidance for Ministry of Defense to prepare national defense policy.

After waiting for one year, National Defense General Policy was ratified by Presidential



Decree No. 97 of 2015. We should welcome this document enthusiastically, since the document is the main reference for all stakeholders related to the national defense. For the Ministry of Defense, this document is important for two reasons. Firstly, the document indicates president political intents, which is used as a main reference to formulate national defense policies. Secondly, the document also describes the government's vision, which is to be translated into the national defense development plan.

This article explores various aspects of defense policy with regards to the realization of global maritime fulcrum. Through this short article, the author offers ideas on how we develop military architecture to respond the need of realizing global maritime fulcrum.



## GLOBAL MARITIME FULCRUM DOCTRINE AS A GEOPOLITICAL CONCEPT

The adoption of political promises of elected president in the grand strategy is not uncommon practice in many democratic countries. Therefore, the adoption of global maritime fulcrum concept in RPJMN 2015-2019 document must be interpreted as the formalization of the elected president's vision in running his administration during his five year tenure. This document acknowledges global maritime fulcrum concept as a national doctrine, which is elaborated in foreign policy as follows: "Strengthening maritime diplomacy to accelerate the solve borders' disputes against 10 neighboring countries; to guarantee the territorial integrity, sovereignty and maritime security/prosperity of the outer islands; and to secure natural resources and ZEE, through the following strategies: (a) maritime and land border negotiations; (b) the implementation of global maritime fulcrum doctrine; (c) dissemination of information, including agreement on limitation of radio transmissions."

The foreign policy elaborated in the RPJMN 2015-2019 indicates that global maritime fulcrum is a geopolitical objective aim. This is endorsed by a political fact, that President Joko Widodo presented the concept before the East Asian Summit in Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014, as follows: ".....Therefore, as a maritime country, Indonesia should assert itself as global maritime fulcrum, as a power that is located between two oceans: the Indian Ocean and the Pacific Ocean. As a global maritime fulcrum, Indonesia has great opportunities to establish regional and international cooperation in the sake of the prosperity of the people ...."

By setting global maritime fulcrum concept, the government is obliged to develop elements of national power, including diplomacy, economic, politics and military. This is relevant to the concept of "Trisakti" that accommodates the spirit of national struggle, i.e. sovereign in politics, self-sufficient in the economy, and personality in culture. As one of government agency, Ministry of Defense is responsible for developing military power, dedicated to support global maritime fulcrum.



## **GLOBAL MARITIME FULCRUM CONCEPT WITHIN THE DEFENSE**

National defense is a government's functions related to the utilization of defense potential and defense strength to deter any threats on national sovereignty, territorial integrity and the national security. In this regard, the government issued national defense policies as the guiding instrument for all related agencies in the field of defense. At the political level, the government stipulates National Defense General Policy, which provides broad guidance for planning, actuating and controlling national defense management.

Global maritime fulcrum doctrine is used as conceptional considerations of National Defense General Policy, particularly in developing national defense posture. It is explicitly elaborated within that document as follows: "National defense development objectives are to establish either military or non military capabilities in order to become regional maritime power in East Asia region, based on defensive active principle, in order to secure national interests. National defense is practically a continuous national defense posture development, which include capability, strength and deployment. Military posture development is directed to meet the Minimum Essential Force (MEF) requirements...."



Substantively, the policy is still a descriptive essay which requires more concrete explanation that can actually be used as guidelines to develop defense capabilities as one of important pillars to shape global maritime fulcrum. To meet geographical challenge, and to produce deterrent power, National Defense Policy should be formulated in more implementable forms. This will ensure that the national defense strategy is applicable.

An applicable National Defense Strategy is a strategy that put national, regional and global the strategic environment as a primary consideration. In addition, the National Defense Strategy should also reflect the geopolitical concept that will be

developed by the government. In this regard, global maritime fulcrum doctrine supposed to colorize the national defense strategy, which will be used as guidance for defense force employment in deterring the threats.

Global maritime fulcrum should be understood as a political intent, which is to be achieved by the elected President. Substantially, global maritime fulcrum concept is to be in line with Indonesia's unique geographic conditions as an "in between" nation. Therefore, global maritime fulcrum must be placed as a primary consideration of government policy at all levels. Thus, global maritime fulcrum doctrine is the back bone of national defense policy, since the doctrine has its geopolitical context.

One important element of National Defense Policy 2015-2019 is a development policy, which leads to defense posture development to support global maritime fulcrum doctrine. That policy is a part of long-term development policy, which was introduced as National Defense Posture Development Plan 2010-2029. In that document, geographical aspect was considered as an important factor to shape military posture. However, it is not clearly reflected in the document, therefore, it fails to provide a firm framework for defense architecture development. The emerging global maritime fulcrum doctrine requires Ministry of Defense to review the document, in order to provide a realistic picture of military posture in support of global maritime fulcrum.

## MILITARY ARCHITECTURE WITHIN NATIONAL DEFENSE POSTURE

It is elaborated in defense posture document that "Ministry of Defense prepares national defense posture, consists of capabilities, strengths and deployment of defense recourses. A national defense posture is deducted from national defense doctrine and strategy, putting geopolitics and geostrategy as a crucial consideration. It is then transformed into integrated tri-services pattern; consist of Army, Navy and Air Forces."

It is further discussed that strengths consists of organization, weapon systems, as well as supporting facilities. While capabilities consists

of five major capabilities, i.e. intelligence, defense, security, territorial empowerment and supporting capabilities. The existing professional defense strengths, then, are deployed according to national defense strategy to face real and potential threats.

There is a crucial question, whether national defense posture meets the requirement to achieve global maritime fulcrum. To answer that question, there are at least three parameters, i.e. national defense strategy, military posture, and TNI's doctrine. First, the current national defense strategy is focusing more on threat analysis than geographical analysis. Second, military posture accommodates more military power aspect, while geography aspect is not considered proportionally. This phenomenon is reflected in military deployment. Third, Integrated Tri-services (*Tri-matra Terpadu*) concept is interpreted as a grouping of three services into one joint forces command.

The three parameters failed to depict military architecture, capable to support global maritime fulcrum doctrine. It is imperative to put military architecture as an integral part of national defense posture, and describes it explicitly in that document. Military architecture is defined as a dynamic structure, describing the relationship between among the elements of military defense system. Thus, the military architecture is the dynamic aspect of military posture, as a result of strength, capabilities and deployment of military power. This military architecture provides the framework for Integrated Tri-services formulation.

Military architecture can simply be described as a dynamic fusion between warfighting functions existing in individual services, which integrated in a capable military power to counter threats. Warfighting function is a group of tasks and systems (people, organizations, information, and processes) united by a common purpose that commanders use to accomplish missions objectives. The functions include at least (1) sensor function (2) command and control function, (3) striking function, (4) mobility function, (5) power projection function, and (6) support function.

Sensor functions include collecting and transforming information/data into intelligence,

as well as intelligence distribution to other elements in military campaign theater. Global maritime fulcrum requires integration of all military sensors (Air Force, Navy, and Army) into integrated sensor systems. It also important to ensure that civilian sensor is also integrated to the systems due to lack of military assets. Legal binding mechanisms should be considered carefully in the integration of civilian sensor system into military sensor.

In order to function optimally, military sensor function must be organized into different layers, starting from the tactical, operational up to strategic level. The sensor functions will be reliable only if it supported by a sophisticated information technology and computer services as well as reliable communications systems. However, it must also bring human sensors into the system proportionally.

Sensor system is very crucial aspect of military architecture. It is the eyes and ears of the military defense systems. It will ensure whether military architecture meet global maritime fulcrum objective or not. Therefore, developing reliable sensor systems should be a priority. Without reliable sensor systems, military architecture is unable to detect and identify threats to our national security.

For the time being, the development of military sensor is mainly dedicated to national air defense system. In current system, the use of services' sensor is coordinated with operational procedures by the National Air Defense Command. This arrangement is not adequate to meet all services demands for real information which is imperative to conduct services' operation. In the future, the development of sensor systems must be planned, collaboratively among all services and coordinated by Ministry of Defense office. The utilization of national satellites becomes a necessity. This will expand the operational reach in information collection.

Command and control is the exercise of authority and direction by a properly designated commander over assigned and attached forces in the accomplishment of a mission. It is understood that the command and control is the center of warfare activities, where units involve either directly or indirectly in military campaign within theater of war. This function determines

the success of war. Commander exercise his command by using command and control system (facilities and equipment, information management, procedures and personnel).

Various services employed in a single theater of war require integration of command and control. Integrating command and control system is a key to achieve interoperability.

Interconnectivity between the command and control system with sensor system determines the success of the military operation. The success of Operation Neptune Spear (which killed Osama Bin Laden) is an example of how command and control system is able to overcome space and time constraints in complex military operation. In that operation, satellite was utilized to exercise command and control successfully. The use of satellite in command and control will also increase information security required in any military operation.

Command and control system should be developed collaboratively among services in order to achieve unity of command in joint military operation. Command and control systems and sensor systems work together in military decision making process; therefore they must be designed mutually.

The striking function is conducted through a series of destructive activities against enemy forces using weapon systems. Weapon system is the decisive elements of military architecture. It transmits a message to deter opponent's intention not to attack. For this reason, weapon system is given an upmost priority in military acquisition.

It is common that weapon acquisition in any nation faces some constrain. In developing countries, budget is the main reason for the government to purchase weapon system. On the other hand, developed countries face lack



of public support. Therefore, every nation has its own way to fulfill weapon system requirement problems.

Learning from experience, we need to improve efficiency by integrating acquisition process of different services into single process. By integrating the process, we can prevent any redundancy in cross-service weapon system procurement. Additionally, another benefit

of integrating the process is the increased of interconnectivity and interoperability.

The sustainable way to equip the military is by producing weapon system domestically, therefore, the government effort to empower defense industry through Act No. 16 of 2012 deserves appreciation, since it has optimized the use of limited budget.



Kita  
ko

Mobility function is defined as a capability of military forces which permits them to move from place to place while retaining the ability to fulfill their essential tasks. Mobility is essential to move forces from one operating area to another operating area in the theater of war to achieve unity of effort or to approach the enemy position. Mobility plays very important role in military architecture, especially when it face a



complex archipelagic challenge. Implementation of this function must be supported by reliable and capable military transport system.

Forces' movement is aimed to shorten operational reach in order to gain momentum in a military campaign. To accomplish these tasks requires multi modal transportation system in order to overcome geographic challenge, such as chain of small islands and big island. It seems that current military deployment does not reflect the characteristic of archipelagic military organization.

Power projection is the utilization of military force to resolve a crisis, provide deterrent effect and improve the stability of the region. Many countries use these terms differently depending on the characteristics of the country. In the maritime context, the US Defense Department defines power projection as the use of force in the maritime environment, including the use of military to destroy enemy military power or to prevent military opponents intend to approach own forces. Maritime power projection is usually conducted by sea control operations, using naval forces (backed by air and ground operation) in order to achieve military objectives in the vital sea areas. This operation is conducted by destroying enemy naval power, disturbing enemy sea lanes of trade, securing vital sea lanes of communication and gaining control of the sea.

In conjunction with global maritime fulcrum doctrine, the inclusion of power projection in military architecture will open public debate, especially if linked to our foreign policy and national defense strategy and doctrine. In this regard, the military projection will be recognized as an offensive action which is against our national defense doctrine/strategy. We can track these views from National Defense Strategy document as follows, "... in defensive active system, the economy should used to put a pressure on other countries that threaten Indonesia." In another section it is stated that, "In the defensive active system, military power must be developed to create deterrent effect, to gain respect from other countries." It is further elaborated that, "to anticipate potential military threat, Indonesia develop a defensive active Strategy. One form of defensive active defense

is to make diplomacy as vital means to defense our country. War must be prevented using political approach by using diplomatic tools." Using common sense, it is understood that our national defense does not promote the use of military power.

The concept of deterrence in defense strategy/doctrine is based on the use of weapon system as a power. "Indeed, deterrence by rejection is the ideal concept of defense because it prevents opponents using military power. Application of this concept prevents war. However, it requires strong defense system based on sophisticated and reliable weapon system." Thus, putting power projection function will be easily understood as a contra defensive active system of our foreign policy.

Allegedly, power projection should not be interpreted as an aggressive element of our defense strategy/doctrine. Power projection, on the other hand, is the right answer to the insufficient military strength. In the theory of operation, we get used to military terminology: operational reach. TNI defines operational reach as a distance that can be reached by a military force to carry out the operation. Operational reach is related to geography and division of elements, such as the placement of the main forces, reserve, forward base and logistics support. Operational reach is achieved by increasing the range of the weapon system; carry out refueling in the air, increasing lift capability, and increasing lines of communication effectiveness. While the US Department of Defense defines the operational reach as follows:"Operational reach is the distance and duration over which a joint force can successfully employ military capabilities. Reach is fundamentally linked to culmination and is a crucial factor in the campaign planning process. Although reach may be limited by the geography surrounding and separating the opponents, it may be extended through forward positioning of capabilities and resources, increasing the range and effects of weapon systems."

From those definitions, we understand that power projection is a just solution for lacking of weapon system and a great answer for geographical challenge of maritime nation. Power projection would not make Indonesia



as an aggressive nation. Power projection is basically the implementation of offensive principle, one of the most important principles of war. At the strategic level, offensive is essential elements to seize the initiative and determining factor for victory. Aggressive and offensive are two different characteristics of war. Aggressive is related to the character to conquer and to occupy, while offensive emphasis on effort to achieve initiative.

Support functions, according to Cadek Doctrine, related to the ability of military



support in national defense and the national security practice. Support function has a very wide spectrum, both in MOW and MOOTW. In MOW, support functions involves intelligence operation, national air defense operation, territorial operations, information operation, electronic warfare, NBC operation, survey operation, special forces operations, search and rescue operation, refugees and IDP operation. While in MOOTW support function include HADR operation, refugees operation and peace keeping operation.

Despite its supporting in nature, this function has important role. In regard to defense force development to realize global maritime fulcrum, support function must be developed appropriately in order to improve our military quality.

## **DEVELOPMENT OF MILITARY Defense ARCHITECTURE**

As a dynamic element of military posture, military architecture should be built up in



conjunction with military posture development. In this regard, military architecture is a template to shape the static elements of military posture which includes capability, strength and deployment. To be so, military architecture development must take strategic environmental analysis into deep consideration, especially consideration of national geography dynamics.

Analyzing national geographic condition is very important part of military architecture

development process. There are at least two reasons, first, Indonesian geography is so vast. Hence, it in turn will put great challenges and opportunities on military architecture development. Second, the complex nature of Indonesia geographic environment will create unique characteristics of warfighting functions, with regards to national military strategic options to be implemented within national defense context.



source jakartagreater.com

Wargaming is an important phase in military architecture development process. It should be designed to put military forces desicively in military operations to compel any threat to national sovereignty. If it is done properly, it will depict the reliability of military posture to answer any challenge coming from vast archipelagic geographical environment.

Preparation of military architecture to support global maritime fulcrum does not

necessarily implicates the raise of budget to purchase additional weapon system, because military architecture is basically shaping existing military posture to be more effective to conduct it's tasks. Perhaps there will be a need for improvement in some area while at the same time we can reduce idle capacities in other areas, which will free the posture from unnecessary redundancy. For example, there is lack of capability of sensor system; on the contrary, we found some excessive use of resources in support functions. Therefore, we need to restructure our warfighting functions more proportional.

Military architecture is substantively part of national military strategy and serves as a bridge to planning a military campaign. Therefore, the Ministry of Defense is responsible for formulating military architecture. Ministry of Defense should welcome Armed Forces Headquarters and Services Headquarters in the process. After military architecture is formed, the next hard task is to periodically review it to ensure that the architecture plays its role well within dynamic strategic environment and national geography.

## ENCLOSURE

Military architecture is not just instrumental in strengthening military posture, it also crucial to increase deterrence effect against any potential threat to our sovereignty. In archipelagic context, military architecture is prerequisites to support global maritime fulcrum.

Finally, the writer expect that this brief article will stimulate all national defense strategy stakeholders to bring up some great ideas in formulating the utilization of military to bring back our national glory as global maritime fulcrum.\*\*\*

# **INDONESIA MEDICAL ASSISTANCE TO REPUBLIC DEMOCRATIC OF TIMOR LESTE**

## **Friendship for the Present and Future**

By:

Col. Iwan Trihapsoro, MD, MDerm, Avmed Spec, FINSDV, FAADV

Chief of Transportation & Dermatologist of the RI-RDTL Task Force, Chief of Medical of the Air Force Command I, Jakarta

National defense system in medical field is conducted to support Operation Military War (OMW) and Operation Other Than War (OOTW) according to article 7 Indonesia Defense Force Law No. 34, 2004. National defense system in medical sector put human resources as a core of strength. The quotes "man behind the gun" explain how important are the human resources to manage all other resources.

To enhance their ability, the medical personnel need formal and non formal education, training and national or international field experiences. The experiences can be achieved through civic missions like mass treatment or social works. The TNI or Indonesia Defense Force has many OOTW activities both in country and outside the country. There are needed due to war, conflict or natural disasters. A medical assistance to RDTL



is one of many kind of programs that have been made. The mission is important for Indonesia to increase bilateral cooperation between RI and RDTL, capacity building measure and looking for new opportunities in the future.

## THE INVITATION RDTL

At July 9, 2015, the RDTL Minister of Defense wrote a letter of invitation to Medical Team of Central Army Hospital Gatot Soebroto, Jakarta to do a medical service in Timor Leste. This letter then responded by Indonesian Minister of Defense, General (Ret) Ryamizard Ryacudu to develop a medical task force consisting of the Indonesian Army, Navy, Air Force, Center of Health of TNI HQ and Mindef. The mission will be executed along with KRI dr Soeharso 990, a hospital warship from Indonesia's Eastern Fleet.

The Task Force then made a term of references as a guide of the mission, Letter of Order of the task force team from the three forces, some internal meeting and coordination with the RDTL representative in Jakarta. The advanced team was sent to Dili to see what the RDTL really need, the spectrum of the diseases and also to assess the medical resources and health infrastructure that can be used. Meanwhile the hospital warship was prepared in its Main Naval Base in Surabaya, East of Java. The medical service will be carried out on the ground and in the ship for selected cases. Two medical battalions from Army and Marines will also on board and will do the ground medical services. The main medical services were general and specialist medical services including dental services. The patients were from RDTL veteran, police and military active duty and the people of Timor Leste. Approximately 2000 patients were expected on this mission which would be from January 30th to February 1st 2016 in Dili.



## THE HOSPITAL SHIP, KRI DR SOEHARSO SHS 990

The task force used the Indonesian Warship (KRI) dr. Soeharso. It was a Landing Platform Dock built in 2003 named KRI Tanjung Dalapele and on August 1st 2007 become a Hospital Ship named after a national hero, Dr Soeharso, with identification number 990. Commanded by Commander Ashari Alamsyah, the warship is able to carry 75 crews and 65 medical personnel. In emergency, it can carry 400 troops and 3000 passengers.

With a total length of 400 ft, an overall beam of 72 ft, and a hull draught of 22 ft, it is powered by diesel engine and can displace around 16,000 tons at full displacement and reach a top speed of 15 knots with a standard range of 8,600 nautical miles. The hospital ship is equipped with 1 emergency room, 3 operating theater, 6 polyclinics, 14 support room and 2 nursing room with 20 beds on each room. The head of the hospital was Commander A. Pudji Widodo MD from Eastern Fleet Medical Service. This trip was the first overseas mission carried out by the vessel in cooperation with the Ministry



of Defense. For this mission KRI SHS-990 carry one helicopter Bell 412 EP, built by PTDI Bandung West Java in 2012, belongs to 400 Squadron Air Wing 1, Naval Aviation Center for air evacuation. It also carried 2 Landing Craft Unit (LCU) for personnel and logistic transportation.

## THE UNFORGETTABLE JOURNEY

The task force strength was composed of 426 personnel including 156 crews of the ship and 51 specialist doctors and dentists. This team was lead by Director General of Defense Strength, Rear Admiral Agus Purwoto and his deputy, Director of Health BG Hardjanto MD, Mrs Nora Ryamizard Ryacudu, a dentist and Col Asrofi, MD a plastic surgeon both from Gatot Soebroto Central Army Hospital Jakarta. As a steering committee was First Admiral I Dewa Gede Nalendra MD, a thoracic surgeon, Chief of Ramelan Navy Hospital Surabaya and Navy Captain Wiweka MD as an operation officer.

After four days unforgettable journeys from Surabaya, the ship arrived in the port of Dili on January 29th 2016. The ship was warmly welcomed by Indonesian Ambassador in Dili, Primanto Hendrasmoro, and RDTL Defense Minister, Cirilo Cristovao, Foreign Minister and Cooperation, Hernani Coelho and Health

Minister Maria do Ceu Pina and the citizens of Dili. A Checupo welcomed dance from Los Palos distric was performed to welcome the task force team. The RDTL Defense Minister Mr Cirilo Cristovao stated that this mission was the realization of the good relations between the two governments. The medical service then was officially opened by Commander Forza Defeza, Major General Lere Anan Timor. The high ranking officials then toured the ships facilities. Meanwhile hundreds of veterans, police and military personnels of RDTL waited to be examined, since the first day was dedicated to them and their families.

The medical service was conducted both on the ground at the port of Dili and in the hospital ships. General and specialist polyclinics as well as dental clinic which have no major surgery was done on the ground. The medical battalions set up tents and prepared the building in the harbour to use as clinics.

The ground polyclinics were General Clinic, Dental and Oral Surgery, ENT, General Surgery, Ophthalmology, Internal, Neurology, Pediatric, Cardiology and Dermatology. In the ships there were neurology clinic which performed an early detection for 60 stroke patients, cataract surgery, major surgery and other selected surgeries. Some RDTL doctors, mostly graduated from



Cuba, also took part in the clinics and operation room.

At the first day, 765 veterans and active duty personnel were treated including some of the VIP being also medically checked up including 13 operations. At the second day, there were 1955 patients including 113 operations. At the third day, as a last day, there were 706 patient and 70 operations. The total were 3426 patients and 196 operations! These numbers had exceeded the expectation which were 2000 patients. Surprisingly, most of the minor operation were 123 circumcision patients. The citizens of Timor Leste who mostly could speak *Bahasa Indonesia* said that they hope the service would last 1 or 2 weeks, so more of their families could have benefit from the mission.

## FUTURE HOPE

Mr. Xanana Gusmao, currently the country's Minister of Planning and Strategic Investment, visited the ship twice and expressed hope that such activities could be expanded in the future. He said *terima kasih banyak* (thank you very much), *obrigado barak*, in Tetun, for the medical assistance being done by Indonesia.

Mr Xanana Gusmao said that this mission

would enhance the relationship between the government of Indonesia and Timor-Leste. In the future, he hoped that this activity would be organized in some other areas of Timor-Leste.

At the end of the mission, RDTL Minister of Defense (Ministerio da Defesa) gave a medal of honor for all members of the Indonesian Medical Task Force as an appreciation of their outstanding services for the peoples of Timor Leste. The medal was received by BG Hardjanto representing all military members and Mrs. Nora Ryamizard Ryacudu representing all civilians. The medal are given at the military ceremony of the RDTL Armed Forces Anniversary. The Indonesian Minister of Defense, General (Ret) Ryamizard Ryacudu witnessed of the medal parade and ceremony.

After three days of serviced, the KRI SHS 990 and its crew were departed from Dili harbour to his next mission, leaving behind the satisfied patients, friends, brothers and sisters. See you next time Timor Leste, "Obrigado Barak"\*\*\*

# **NATIONALISM OF THE COMMUNITY AS A FORM OF STATE DEFENSE TO ESTABLISH DEFENSE STRENGTH**

By:

Colonel Cba W. Jati Wahono

Analyst at Human Resources Directorate - Directorate General of Defense Strength,  
Ministry of Defense

Pluralism in Indonesia is fully characterized with various ethnic groups, customs, religions and cultures. It is not easy for a nation as such to gain independence. Only with a sense of togetherness, solidarity and unity as a nation then country is able to realize independence. An independent country, without nationalism, its people would be hard to maintain the independence that had achieved with hard work and enormous casualties.

Civil society should have will, ability and courage to control and criticizing government wisely and responsibly. It should also be capable to become channel and mediator of many interests between state, individuals, and communities, by being honestly, objectively and highly recognized pluralism in society (acknowledgment of various differences).

Strengthening nationalism has been begun during the struggle for independence. Psychologically, it has formed a state defense behavior within the society by implementing attitude, behavior, and action to realize rights and obligations to ensure continuity and development of United State of the Republic of Indonesia (NKRI). Commitment and nationalism within civil society in the form of state defense has significantly been demonstrated in struggle to gain independence as well to fill it with the development. Nationalism commitment is continuously being tested by many forms of threats, challenges, obstacles and interferences directly and indirectly both from internal and external. Yet, it has been able to guarantee identity and integrity of nation and state, as well as to achieve national goals.

State defense has been conducted to develop citizens who can give contributions in creating awareness of state defense. It is developed by forming mental attitude and character of Indonesian who have patriotism,



love for nation and state, loyalty to *Pancasila* as state ideology, willingness to sacrifice for nation and state. Hence, it is trajectoryed for the survival of nation and state as well as national sovereignty, territorial integrity, and safety of entire nation from all threats (country defense).

## INTERPRETING DEFENSE STRENGTH

"Defense Strength" is established by mobilizing military and non-military defense strength in an integrated total defense system. The deployment of strength has been implemented fully to face military, non-military, and hybrids threats either to a part or to a whole country.

Civilization (Civil Society) can be defined as community or country in which the citizens live well, organized, orderly, polite, not barbaric, intelligent and developed (Nourouzzaman Shiddiqie MA, 1993, pp. 5-7 and Prof. H. Mahmud Yunus, Arabic-Indonesian Dictionary, p. 414).

Before independence, nationalism is the main tool in defense strength during struggle for independence. Nowadays, state defense is a tool of supporting component that together with other components (main component and reserved) establishing defense strength. The national defense strength is built of the Main Component and reinforced with Supporting and Reserved components.



Prominent features of national defense strength are: first, capability to handle security of maritime, land, and aerospace; second, capability in promoting world peace based on free and active policy; and third, capability in facing threats and has deterrent power of archipelagic country to support World Maritime Fulcrum. It is also to prepare national defense with its characteristic i.e: total - involves all citizens, territory and all national resources. Total defense is implemented through military and non military defense synergy, integratedly and coordinatedly facing military, nonmilitary and hybrid threats,(2) Preparing active defensive strategy - active defensive defense strategy is not aggressive nor expansive, however it still prioritizes national interests, comprising (a) active defensive defense strategy in facing

military threats that is done through diplomacy to prevent other countries intention to attack or threaten the national interest. At the same time, military defense and non-military defense is used to strengthen diplomatic efforts, and being used in advanced stages when diplomacy fails, (b) active defensive strategy in facing nonmilitary threat is conducted by ministries/ institutions outside Ministry of Defense and being carried out through development of potential areas for defense streghth; and (3) Layered defense – comprehensive, integral, and holistic defense strategy that to face dynamic threats both real and not real threats. Layered defense is implemented and developed to counteract, cope, and handle any threats by synergizing military and non-military defense. It is the implementation of active defensive



strategy that based on total defense, integrated as a national defense strategy, and supporting each other in threat prevention and handling.

## NATIONALISM AS A FORM OF STATE DEFENSE

Nationalism values contain rules or norms that must be embedded and engraved within soul of the whole nation. It should be seen in words, behaviors and actions that show spirit of nationalism that symbolizes a sense of togetherness, solidarity and nationality, as well as unity and integrity as a nation. Nationalism that non-chauvinistic should be fostered and maintained in national life and everyday practice and subsequently been contained in

state legislation and constitution. The history of the struggle in which our ancestors reached the archipelago as independent residence, should trigger fighting spirit of us in today's modern age. The goal to obtain a place under the sun that will bring happiness and harmony in just and prosperous society.

The living conditions of today's society are colored by many problems that increasingly become more powerful in affecting fundamental livelihood. Thus, sense nationalism is urgent in creating a form of state defense to deter and prevent all form of threats that might disrupt sovereignty of the Republic of Indonesia. A nationalism crisis will be a beginning of disaster towards sustainability of Indonesia. Therefore, nationalism is very important to be realized and embedded in whole nation. So far, irregularities and degradation in values of nationalism still happen.

Lately, nationalism in *Indonesia* has experienced a shift. The decline of nationalism can be identified as follows: First, justification to use religion and belief as basis for terrorism. Second, the loss of characteristic of civilized and cultured people who has feeling, creativity and initiative in supporting life. It has turned into anarchic problem solving actions influenced by full of injustice, human rights violations, and freedom of exercise violations. Third, sense of pride, love of nation and state had been decreased. Fourth, loss of deliberation in forum discussion and replaced by voting. Fifth, increasing monopoly, conglomeration and corruption, and loss of justice.

State defense is a pattern of citizen's behavior and attitude resulted from love to the Republic of Indonesia (NKRI) that is based on *Pancasila* and 1945 Constitution in order to ensure survival of nation and state.

State defense spectrum is very broad, started from the most subtle such as good relations between fellow citizens in the neighborhood, do the best for nation and state; up to the highest level in the form of working hard, creating security on social level, eradicate corruption, war against drug abuse, security



towards counter-terrorism, deterrence of real threat, and contributing to the rule of law and human rights, as well as maintaining dignity of the nation.

State defense forms can be realized through nationalism. "Nationalism" can be defined as political attitude of a nation who has common culture and territory as well as ideals and goals so that people of the nation feel deep loyalty towards the nation.

Nationalism (patriotism/nationhood outlook) is national spirit and national will of the communities that are not oriented to ethnicity, race or religious group. For the state's interest, nationalism has become a foundation of sustainability of the Unitary state of Republic of Indonesia, with the implementation of (1) The spirit to defend the homeland, (2) Pride to be a part of NKRI, and (3) Participation (supporting government programs), and (4) Willingness to sacrifice. National values are formed through awareness of willingness to sacrifice as a consequence of obedience and adherence to applicable regulations.

## REALIZATION OF DEFENSE STRENGTH

The defense strength consists of main component, reserve component, and supporting components that are manifested in transformation of national resources into defense. Social participation in creating defense strength is citizen's right and obligation of state defense in the formation of supporting components. The people have huge role and contribution in the process of national development, in the past, present time, and in the future. Process to develop defense strength needs adequate resources, including community participation in defense field. Basically, state defense form gives impact directly or indirectly on outputs of defense strength development. In total war strategy, community participation in managing the country among other, are shown in supporting and maintaining the integrity of NKRI. The community is also built professionally with reference to nationalism as a part of the defense strength development.

The role of the community in state defense, among other things: First, willingness to sacrifice. National values should be established through awareness that there is a demand of willingness to sacrifice – it is as consequences of obedience and adherence towards common regulations. Second, patriotism. Patriotism and fighting spirit should be only for the nation and country. The best thing for the nation is the best for the community (citizens) as a part of the nation. Patriotism spirit appeared from disrupted livelihood. Third, the spirit of unity and the diminish of primordialism. Indonesia is a pluralistic society; a country that is built by uniting people of various ethnic groups into a nation state. Fourth, a high commitment.



Commitment is an agreement to do a contract. (Department of National Education, 2005, p. 452).

Today's community service contract is a form of state defense. By law it has right and obligation to defend the country by not carrying out violent activities (day without violence). Among others things: (a) Lack of balance or equality between community groups. (b) Freedom of aspirations is not fully accommodated. (c) Strong individualism and individuality behavior. (d) Tendency of widening tolerance gap differences. (e) The form of balance in conflict resolution and consensus to end the conflict. (f) Uncertainty of law and

order as well as injustice has raised a claim that law is only applies to ordinary people. (g) Fake patriotism by committing terrorism that destroy the life of nation.

The description above shows that contribution of the community is significantly having impact in realizing defense strength which projected to have community who have the spirit to defend their homeland, have a sense of pride being part of NKRI, and participation in supporting government's programs, as well as willingness to sacrifice for nation building as well as integrity of NKRI.\*\*\*



# THE NEED TO MANAGE CADRE WITHIN INDONESIA'S NATIONAL DEFENSE FRAMEWORK

By:

Col. Inf. F. Hari Moelyono, S.E

Auditor at Inspectorate General, Ministry of Defense

State Defense Awareness Development Program (*Pembinaan Kesadaran Bela Negara - PKBN*) is a governmental program focused in maintaining and fostering love for the country. PKBN's programs then should be planned in synergy with other relevant agencies' programs to reduce radicalism's impacts. PKBN's program is also intended for people in border areas and conducted with maximum cooperation with related Ministries/Institutions. In order to improve the welfare of people in border areas,

as well as enhancing a sense of patriotism and pride as Indonesian citizens, Indonesia government should provide a real sustainable program.

## LEGAL BASES

1. The 1945 Constitution Article 27 Paragraph 3 states every citizen has right and obligation in state defense efforts; Article 30 Paragraph



- 1 states that every citizen has right and obligation in state defense and national security efforts.
2. Presidential Decree No. 2 of 2015 on National Medium Term Development Plan Year 2014-2019 in Chapter VI on Defense and Security states that in order to establish integrated national security system, the state should implement policy direction to increase state defense awareness, attitudes and behaviors in the society through State Defense Education Strategy.
3. Presidential Decree No. 97 Year 2015 on Defense General Policy Year 2015-2019 Appendix number 3 letter a9) on national character building. National character building is a part of mental revolution; it should be organized through development of state defense awareness and capability of every Indonesian citizen in order to prepare national defense human resources, as well as strengthening national identity that based on Pancasila and 1945 Constitution. Appendix 3 letter b6) on Empowerment of Ministries/ Institutions and Local Government through the improvement state defense awareness.
4. An MoU between Ministry of Defense, Coordinating Ministry of Politics, Law and Security, Ministry of Home Affairs, Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reforms, Ministry of Education and Culture, Ministry of Research, Technology and Tertiary Education, Ministry of Religion Affairs, Ministry of Youth and Sports, National Police Force and National Quarter of Scout, dated on 6 August 2015 on Development of State Defense Awareness.

## **STATE DEFENSE OUTSTANDING ISSUES.**

Continuity in State Defense Education has generated many leaders. However, there are shortcomings and problems that need comprehensive treatments, such as:

1. There are still limited numbers of people who understand State Defense Awareness issue; it is due to varying levels of understanding.
2. Results of PKBN programs have not yet been optimal due to limited number of mentors and infrastructures.
3. The implementation of State Defense program is often being misunderstood as Militarism.

Those problems have been gradually overcome by policy of Ministry of Defense that put State Defense as priority program.

## **EFFORTS TO OVERCOME AND TO INCREASE DEVELOPMENT OF STATE DEFENSE AWARENESS.**

1. There are limited numbers of people who understand State Defense Awareness. It is due to assumption that state defense and security should solely be responsibility of Indonesia Armed Forces. However, 1945 Constitution Article 27 Paragraph 3 states every citizen is entitled and obliged to participate in state defense efforts. Therefore, efforts to be considered, such as:
  - a. State defense awareness cannot be automatically gained but it should be developed from early age through school education, awareness in work environments, and in residential environments. State defense is a form of mental revolution, yet also efforts to develop deterrence towards various national problems and threats including radicalism. The most basic effort is to make all people love their country then continue with awareness on rights and obligations of state defense.
  - b. Being an example and role model to give motivation and to change attitudes and mindsets in order to have more positive in their way of living, to realize the rights and obligation of state defense, as well as to have a sense of pride and honor in sacrificing time, energy, and thought for public interest – that is undoubtedly a state defense conduct.
2. PKBN activities have not yet reached maximum results due to there is no integrated



materials from Ministries/Institutions/Agencies on subject matter. Though cadre education either in the center or local areas has been coordinated by Ministry of Defense, the state defense awareness is expected to be more comprehensive.

PKBN alleviation efforts are in:

- Educational environment – the Ministry of Education as leading sector can start by socializing state defense educational curriculum as inter-curricular materials within the subjects of *Pancasila Moral*

Education, Citizenship and national history; as well as for extra-curricular activities such as Scouts, Youth Red Cross, Arts activities, etc. It can also be in the form of applicative activities such as disaster response training and commemorating national days. Those simple activities should be conducted from time to time throughout the year to gain optimal results of national character building.

- Work environment - State defense educational activities can be carried



- out by internal activities - in which the leaders already have national leadership training, as well as state defense training for employees that organized centrally. The Ministry of Labor as leading sector has to encourage companies to equip their employees with state defense understanding in order to make them psychologically and physically ready in state defense training. It should be focused, measured and professional.
- c. Residential environment - cultural differences as well as education levels

will affect application method; therefore, flexible programs that far from dictating or patronizing should be used. Committed in social life such as engagement in neighborhood watch will make people knowing each other, looking after each other, and caring for each other in the neighborhood area. Therefore social conflict can be eliminated as well as creating social capital that will become the basis of nation character development.

3. There are still arguments that State Defense Program is equal to Militarism. Those understanding make some NGOs do not agree with the implementation of the State Defense Development. Therefore some efforts to promote State Defense Awareness Program are needed, by:
  - a. Socializing to all national elements that every citizen has obligation to participate in national development. State defense awareness program is not a militarization program; it is not military education or training in concentration military camps. That opinion should be eliminated. The Ministry of Defense takes initiative in forming the State Defense Cadres from civil society who are hopefully able to spread state defense to other people in their district/home town.
  - b. Develop and encourage a sense of nationalism and love to the homeland should be nurtured in educational settings from kindergarten, elementary, junior high, high school, and higher education levels, as well as in occupational environment (workplaces) and residential environment (family, neighborhood community, districts up to provincial level). For example, in kindergarten and elementary school level, the students should recognize state emblem, national anthem, national heroes, and able to communicate well with other fellow citizens as well as greeting each other. Fostering State Defense Awareness will create soft power that over the time will create a deterrent effect.



## CONCLUSIONS.

The conclusions are as follows:

- a. State Defense Awareness Development Goal is to foster love for the homeland, to have national awareness, to accept *Pancasila* as state ideology, to have willingness to sacrifice for the nation, as well as to have initial capability of state defense.

- b. State Defense Awareness Program is a mean to develop social discipline in daily life and to form people who are willing to sacrifice themselves for the sake of nation, as well as to form a dignified society.
- c. State decline and destruction can be caused by inability of leaders who cannot inherit noble values of nation's culture to successive generations.



## RECOMMENDATIONS.

- a. To draft specific and clear regulations of who is doing what in dealing with the issues of not supporting the continuity of state defense.
- b. To provide adequate hard and soft instrument socializing PKBN. Methode in training and education should be updated.

- c. To empower training center of Ministries and related institutions in actively supporting the PKBN training.\*\*\*

# **THE ROLE OF TNI IN GLOBAL HEALTH SECURITY AGENDA (GHS)**

By:

Col. drg. Buyung Nazeli, MARS

Head of Sub-directorate Health Development of Directorate of Health - Directorate General of Defense Strength,  
Ministry of Defense  
and

Col. Kes dr Iwan Trihapsoro, SpKK, SpKP, FINSDV, FAADV

Head of Health in Operational Command of the Air Force I, Jakarta



## **INTRODUCTION**

Today's high-level interaction has arisen certain vulnerability towards spread of infectious diseases. Nevertheless, high-level interaction also led to international cooperation in disease treatment and management. Public health issues should be discussed thoroughly considering many aspects, including international security, specifically health

security (Edi Yusup, Deputy of Indonesia's Permanent Resident to the UN in Geneva).

Accordingly, Indonesia has been one of 29 countries of Global Health Security Agenda (GHS) that was launched in February 2014 by United States and World Health Organization (WHO). Indonesia realizes that international cooperation in prevent detect and respond to infectious diseases threat has to be improved

whether it is intended for naturally occurring, deliberate or man-made, or accidental/unintentional cases.

GHSA is states, international organizations and civil society efforts to accelerate progress towards healthier and securer world from infectious disease threat. It is to promote global health security as international priorities as well as to accelerate implementation of International Health Regulations (IHR) 2005 of World Health Organization (WHO), World Animal Health Organization (OIE), Performance of Veterinary Services (PVS), and other global health security frameworks.

GHSA was formed on 13 February 2014, after 29 countries, European Union, WHO, FAO and World Animal Health Organization agreed to realize a world that is able to prevent, to detect, and to promptly respond infectious disease threat cases whether it is natural, deliberate, or unintentional.

## GLOBAL HEALTH SECURITY DEFINITION

WHO defines Global Health Security (GHS) as efforts needed to reduce vulnerability of people around the world against spread of acute and new diseases that threaten health – particularly people who are cross international borders. GHS terminology is used to describe country's required capacity to prepare for and to respond to public health threats as well as to reduce risks of those threats entering countries from international borders.

World disease threats such as Ebola and Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (Mers-CoV) that have spread from person-to-person and over borders will have impacts to public health of entire nation. That risk is also higher for poor and developing countries since prevention, detection and rapid response system have not been built good enough to face public health crisis.



## **GOALS OF GHSA**

GHSA is a framework that unites global responses towards explosion or outbreak of diseases, henceforth closes gaps in surveillance and response so that disease threat can be stopped as early as possible. GHSA has been built upon existing programs and also has accelerated implementation of WHO, OIE, FAO and other global related frameworks' working programs. Specifically, GHSA will stimulate investments and strengthens cooperation between states, international organizations and civil organizations to achieve goals, such as:

1. Preventing avoidable epidemics - including plague that occur naturally, accidentally or accidentally/unintentionally;
2. Detecting threats at early stage - including detection, characterization and transparent reporting against biological threats as early as possible; and

3. Responding quickly and effectively towards biological threats of international concern.

In GHSA meeting in Helsinki, Finland on 5-6 May 2014, GHSA Action Package and Commitment has been agreed upon as a reference of global address towards infectious diseases spread threat. The commitment of 3 goals and 11 packages consists of:

### **Prevent :**

1. Antimicrobial Resistance,
2. Zoonotic Diseases,
3. Biosafety Biosecurity,
4. Immunization.

### **Detect :**

1. National Laboratory System,
2. Real-time Surveillance,
3. Reporting,





#### 4. Workforce Development.

##### **Respond :**

1. Emergency Operations Centers,
2. Linking Public Health with Law and Rapid Response,
3. Medical Countermeasures and Personal Deployment.

#### **INDONESIA'S LEADERSHIP IN GHSA**

GHSA Steering Group is formed to oversee progress, to identify challenges, and to examine the program implementation in achieving GHSA's goals. GHSA Steering Group consists of 10 countries with alternating leadership. It consists of Canada, Chile, Finland, India, Indonesia, Italy, Kenya, Kingdom of Saudi Arabia, Republic of Korea, and the United States. In 2015, Finland was the chairman. United States became the chairman in 2014. Indonesia acts as chairman in 2016. In addition, WHO, FAO and OIE act as permanent advisors for GHSA Steering Group in appropriate fields.

#### **MAIN DUTIES OF TNI**

TNI is a state instrument in defense field based on state's policy and political decisions. TNI - as an instrument of national defense system - serves as deterrence against military and armed threats from both outside and inside of the country that have impacts on sovereignty, territorial integrity, and safety of the nation. TNI also acts to give measures towards any form of threats, as well as to restore state security if disrupted by chaos.

Law No. 34 of 2004 on TNI states the main tasks of TNI: upholding state sovereignty; defending territorial integrity; and protecting people and country from any threats and disruptions. Those main duties are carried through Military Operations on War and Military Operations Other Than War.

In the case of threatening public health disease, TNI – in corresponding to its principal tasks – has responsibility and direct involvement in cooperation with various government agencies and civil communities to prevent, to detect, and to rapidly response to disease threat. TNI's direct involvement is



also by membership in GHSA national body in which Indonesia currently act as Chairman along with the USA and Finland. Through specified working programs, TNI will support GHSA activities in international and national forums as well as within the body of TNI itself. Elaboration of GHSA working program for TNI will be conducted at Ministry of Defense, TNI Health Center and Military Forces levels. TNI will establish cooperation with other ministries and institutions for the success of program GHSA programs.

### **IMPLEMENTATION OF GHSA IN TNI**

Currently, TNI is participating in national health insurance program (BPJS) in corresponding with its network of hospitals and health facilities throughout Indonesia. At the moment, TNI has 84 Hospitals under the Army, 25 Hospitals under the Navy, 23 Hospitals under the Air Force, and 1 hospital under Ministry of Defense. Besides those

hospitals, there are also other health institutions such as Military Health Institution (Army), Sea Health Institution (Navy), and Aeronautics and Space Health Institution (Air Force). Other than those facilities, each unit forces also has Dental and Oral Health Institution as well as Pharmaceutical Institution that is capable to produce medicine for military needs.

In order to support GHSA programs, the working program should also be included in the Working Program and Budget of each unit forces, TNI Headquarter, and Ministry of Defense. Thus, those programs will be undertaken by Directorate/Health Department of each unit of forces, as well as TNI Health Centre and Health Directorate of Directorate General Defense Strength, Ministry of Defense.

At the Ministry of Defense level, a GHSA desk should be made to coordinate activities of TNI's Health Centers. In its daily implementation, this desk should be chaired by Secretary General of the Ministry of Defense and directly responsible to the Minister of



Defense. The Ministry of Defense acts as the policy maker; while TNI's Health Centers as the implementing forces of strategic activities that coordinate health programs in each force and technical implementer.

Legal basis is also needed for program implementation. Presidential Decree for GHSA, as well as Indonesia's membership in ICMM will make it easier to carry out activities across ministries and agencies as well as to ensure synergy in unit forces. In TNI, Decree of TNI Commander can appoint officers who will be on duty related to GHSA membership at national level – those who will be in charge of day-to-day basis of planning, organizing, implementing and supervising GHSA activities.

In the Health Unit of each service, those activities will be outlined in the working program of the Directorate/health department. It will be conducted in the Headquarters level as coordinator, and then will be implemented by hospitals or health facilities as in accordance to its field in cooperation with other relevant

agencies in their respective regions. For example, in a local area, the military hospitals can work together with quarantine department in airport/seaport/border point, local hospital, department of agriculture, social services, and etcetera to monitor, to prevent, to detect and to manage disease outbreaks.

TNI's pharmaceutical institution can also be used to develop vaccines or other medicineneeded to tackle an outbreak of certain diseases. It can also be used for disease surveillance.

Therefore, health workforce can make a program to build crisis and natural disaster management systems, disease outbreaks tracking, disease surveillance, infection control, pathogens detection, care and treatment, education and training, as well as other activities related with 11 packages in order to prevent, to detect and to response.

TNI's Health Agency currently chairs ICMM for 2015-2017. This very strategic position can also be used to expand network and cooperation with military health institutions of other ICMM member countries.

## CONCLUSION

Health security is not solely TNI's task, however, TNI is fully responsible towards the level of security against Nuclear, Biological and Chemical threats. TNI will and should support Indonesia's membership as well as GHSA chairmanship with the implementation of three goals and 11 packages within of GHSA Action Packages and Commitment. GHSA program should be included in structured working program and has strong legal basis to make its implementation become mandatory, measurable, planned, directed, transparent and sustainable.\*\*\*

**RESEARCH AND  
DEVELOPMENT  
AGENCY**



## POSITION, TASKS, AND FUNCTIONS

### Research and Development Agency (*Balitbang*)

Research and Development Agency (*Balitbang*) is supporting element of the tasks and functions of the Ministry. It is under and responsible to the Minister. *Balitbang* is led by the Chief of Research and Development Research (**Ka Balitbang**) whose tasks are carrying out defense research and development.

In conducting its tasks, *Balitbang* has following functions:

- a. Preparation of technical policies, plans and programs in defense research and development;
- b. Defense research and development including strategy, resources, science and technology, as well as defense equipment and tools;
- c. Monitoring, evaluation and reporting of defense research and development; and
- d. Administration of *Balitbang*.

## ORGANIZATIONAL STRUCTURE

*Balitbang* consist of a Secretariat and four Research and Development Centers:

### 1. Secretariat of Research and Development Agency (*Set Balitbang*).

Secretariat of Research and Development Agency (*Set Balitbang*) is assisting element of the Chief of Research and Development Agency. It is led by Secretary of Research and Development Agency (*Ses Balitbang*) whose task is to provide technical and administration services of the Agency.

In conducting its tasks, *Set Balitbang* has following functions:

- a. Accounting, financial administration management, budget assessment and calculation, evaluation and reporting of working program and budget as well as performance accountability reports of the Agency;
- b. Personnel development, financial administration, materials, administration and internal affairs as well as institutional arrangement and management of the Agency;
- c. Management of data and information, documentation and library, as well as management of computers and data communication network of the Agency;
- d. Management of participation of the Agency in national and international science and technology forums;
- e. Cooperation of research activities, assessment and development of a Coordinating Agency of defense research, assessment and development; and
- f. Preparation of the human resources researcher of the Agency administration materials; coordination and supervision of staff; and staff coordination and supervision.

*Set Balitbang* consists of:

- a. Program and Reporting Section,
- b. Data and Information Section,
- c. Research and Development Coordination Section,
- d. General Affairs Section,
- e. Functional Job Section.

## **2. Defense Strategy Research and Development Center (*Puslitbang Strahan*).**

Defense Strategy Research and Development Center (*Puslitbang Strahan*) is executing element of tasks and functions of the Agency. It is led by the Chief of Defense Strategy Research and Development Agency (**Kapuslitbang Strahan**) whose tasks are to conduct research, assessment and development in defense strategy.

In conducting its tasks, *Puslitbang Strahan* has following functions:

- a. research planning, formulation and implementation, as well as assessment and development in strategic environment, doctrine, system and method, and country region;
- b. monitoring, evaluation, and reporting research, study and development in strategic environment, doctrine, system and method, and country region, as well as give recommendations;
- c. providing research, study, and development services as well as scientific information in strategic environment, doctrine, system and method, and country region;
- d. development of functional research job section in the Center; and
- e. administration and internal affairs of the Center.

*Puslitbang Strahan* consists of:

- a. Strategic Environment Sector,
- b. Doctrine, System and Method Sector,
- c. Country Jurisdiction Sector,
- d. Administration Sub-section, dan,
- f. Functional Job Section.



## **3. Defense Resources Research and Development Center (*Puslitbang Sumdahan*).**

Defense Resources Research and Development Center (*Puslitbang Sumdahan*) is executing element of tasks and functions of the Agency. It is led by the Chief of Defense



Resources Research and Development Center (*Kapuslitbang Sumdahan*) whose tasks are to do research, study, and development in defense resources.

In conducting its tasks, *Puslitbang Sumdahan* has following functions:

- Planning, formulation and implementation

of research, study and development in defense human resources, natural resources, man-made resources and infrastructure;

- Implementation of control, evaluation, and reporting of research, study, and development in human resources, natural

- resources, man-made resources and defense infrastructure, as well as giving recommendations;
- c. Giving services in research, study and development, scientific information in human resources, natural resources, man-made resources and defense infrastructure;
  - d. Development of functional research job section in the Center; and
  - e. Administration and internal affairs of the Center.

*Puslitbang Sumdahan* consists of:

- a. Human Resources Sector,
- b. Natural and Man-Made Resources Sector,
- c. Infrastructure Sector,
- d. Administration Sub-section,
- e. Functional Job Section.

#### **4. Defense Science and Technology Research and Development Center (*Puslitbang Iptekhan*).**

Defense Science and Technology Research and Development Center (*Puslitbang Iptekhan*) is executing element of tasks and functions of the Agency. It is led by the Chief of Defense Science and Technology Research and Development Center (Kapslitbang Iptekhan) whose task is to do research, study and development of defense science and technology in basic research and technology diffusion as well carrying out presentation, demonstration, material and or services, within the framework of defense tools and equipment procurement and transfer technology.

In conducting its tasks, *Puslitbang Iptekhan* has following functions:

- a. Planning, formulation and implementation of research, study and development of defense science and technology in mobility, combat power, supplies, communications and electronics;



- b. Implementation of control, evaluation and reporting of research, study and development of defense science and technology in mobility, combat power, supplies, communications and electronics and giving recommendations;
- c. Services for research, study and development of defense science and technology in mobility, combat power, supplies, communications and electronics;
- d. Implementation of presentations, demonstrations, materials or services trial, within the framework of defense tools and equipment procurement and transfer technology;
- e. Development of functional researcher job section in the Center; and
- f. Administration and internal affairs of the Center.

*Puslitbang Iptekhan* consists of:

- a. Mobility Sector,
- b. Combat Power Sector,
- c. Supplies, Communications and Electronics Sector,
- d. Administration Sub-section,
- e. Functional Job Section.

## **5. Defense Tools and Equipment Research and Development Center (Puslitbang Alpalhan).**

Defense Tools and Equipment Research and Development Center (Puslitbang Alpalhan) is executing element of tasks and functions of the Agency. It is led by the Chief of Defense Tools and Equipment Research and Development Center (Kapuslitbang Alpalhan) whose tasks are to implement and to synergize research, study and development in the main tools and equipment of land, sea and air dimensions that will lead to prototype and production.

In conducting its tasks, Puslitbang Alpalhan has following functions:

- a. Planning, formulation, synergy and implementation of research, study and development in the main tools and equipment of army, navy and air force sectors;
- b. Implementation of control, evaluation, and reporting of research, study and development in the main tools and equipment of army, navy, and air force sectors, as well as giving recommendations;
- c. Giving services in research, study, development, and scientific information in development of the main tools and equipment of army, navy and air force sectors;
- d. Implementation of joint research and development with the appropriate Research and Development Agency of specific sectors;
- e. Development of functional researcher and engineering job section in the Center; and
- f. Administration and internal affairs of the Center.

*Puslitbang Alpalhan* consists of:

- a. Army Sector,
- b. Navy Sector,
- c. Air force Sector,
- d. Administration Sub-section,
- e. Functional Job Section.



402